PERAN SURAT KABAR DUTA MASYARAKAT DALAM MENOLAK PEMAKZULAN PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID TAHUN 2001

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Program Strata Satu (S-1)
Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:
LILIK SUJIYANSYAH
NIM: A72214063

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Lilik Sujiyansyah

NIM : A72214063

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab daan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 17 Juli 2019

Menyatakan

Lilik Sujiyansyah

NIM. A72214063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal, 18 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

Muhammad Khodafi, S. Sos, M. Si

NIP. 197211292000031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan lulus

pada tanggal 29 Juli 2019

Ketua/Pembimbing

Muhammad Khodafi, S. Sos, M. Si
NIP. 197211292000031001

Penguji I

Hj. Muzaiyana, M. Fil. I
NIP. 197408121998032003

Penguji II

Dr. Wasid, SS, M. Fil. I
NIP. 2005196

Sekretaris

Dwi Susanto, S. Hum, MA
NIP. 197712212005011003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Agus Aditoni, M. Ag
NIP. 196210021992031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lilik Sujiyansyah
NIM : A 72214063
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / SPI
E-mail address : Sujiyansyahlilik-22 @ gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Peran Surat Kabar Duta Masyarakat Dalam Menolak Pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Tahun 2001

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2019

Penulis

(Lilik Sujiyansyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peran Surat Kabar Duta Masyarakat dalam Menolak Pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001. Penulis memberikan batasan permasalahan dalam tiga hal, yakni: 1) Bagaimana eksistensi surat kabar Duta Masyarakat pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid? 2) Bagaimana terjadinya peristiwa pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001? 3) Bagaimana upaya surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2001?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sejarah. Metode ini menggunakan empat tahap penelitian yakni Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (penafsiran sumber), dan Historiografi (penulisan sejarah). Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Historis, dengan pendekatan ini penulis berusaha memberikan fakta-fakta sejarah terkait dengan peran surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori wacana model analisis Teun A. Van Dijk.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Eksistensi surat kabar Duta Masyarakat dalam membangun opini publik pada masa pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid masih relatif kecil. 2) Presiden KH. Abdurrahman Wahid dimakzulkan melalui Sidang Istimewa MPR 2001. 3.) Upaya surat kabar Duta Masyarakat dalam membela presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 melalui pemberitaan-pemberitaan yang memihak kepada presiden KH. Abdurrahman Wahid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This thesis under title "Roles of Duta Masyarakat newspaper to reject discontinuance of president KH. Abdurrahman Wahid on 2001". Focus of this thesis are; 1) how was the existence of Duta Masyarakat newspaper on KH. Abdurrahman Wahid era's? 2) How was the discontinuance of president KH. Abdurrahman Wahid on 2001? 3) How was the effort of Duta Masyarakat newspaper to reject discontinuance of president KH. Abdurrahman Wahid on 2001?

To answer those questions, I use historical method. This method use four steps of research those are; heuristics (collecting sources), verification (criticizing sources), interpretation (interpreting sources), and historiography (writing history). I use historical approach to give historical facts about roles of Duta Masyarakat newspaper to reject discontinuance president KH. Abdurrahman Wahid on 2001. Theory which used to analyze this thesis is theory discourse model analyze by Teun A. Van Dijk.

Conclusion of this thesis are; 1) The existence of Duta Masyarakat Newspaper to build public opinion on president KH. Abdurrahman Wahid era relatively little. 2) President KH. Abdurrahman Wahid discontinuing by special court of people's consultative assembly on 2001. 3) Efforts of Duta Masyarakat newspaper to defend president KH. Abdurrahman Wahid on 2001 by their news which takes side to president KH. Abdurrahman Wahid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI.....iv

PEDOMAN TRANSLITERASI.....v

MOTTO.....vi

PERSEMBAHAN.....vii

ABSTRAK.....viii

ABSTRACT.....ix

KATA PENGANTAR.....x

DAFTAR ISI.....xii

DAFTAR LAMPIRAN.....xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian.....9
D. ManfaatPenelitian.....9
E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik.....10
F. Penelitian Terdahulu.....11
G. Metode Penelitian.....12
H. Sistematika Pembahasan.....17

BAB II EKSISTENSI SURAT KABAR DUTA MASYARAKAT PADA MASA PEMERINTAHAB PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID.....19

A. Sejarah Surat Kabar Duta Masyarakat.....19
B. Kiprah Surat Kabar Duta Masyarakat Pada Tahun 2001.....34

BAB III PERISTIWA PEMAKZULAN PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID TAHUN 2001.....43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Perjalanan politik KH. Abdurrahman wahid menuju kursi kepresidenan.....43
B. Alasan Memakzulkan Presiden KH. Abdurrahman Wahid.....48
C. Proses Pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001.....56

BAB IV UPAYA SURAT KABAR DUTA MASYARAKAT DALAM MENOLAK PEMAKZULAN PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID TAHUN 2001.....64

A. Pemberitaan Edisi Mei 2001.....65
B. Pemberitaan Edisi Juni 2001.....71
C. Pemberitaan Edisi Juli 2001.....78

BAB V PENUTUP.....86

A. Kesimpulan.....86
B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA.....88

LAMPIRAN.....92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gus Dur: Saya Tidak Akan Mundur 92

Lampiran 2 651 Kiai Jateng Tidak Rela Gus Dur Dijatuhkan.....93

Lampiran 3 Kejagung Soal Kasus Bulog-Brunei.....94

Lampiran 4 FKB Harus Menggugat.....96

Lampiran 5 Kawan-Kawan Siap Bela Gus Dur.....97

Lampiran 6 Prodem Jatim Sepakat Tolak SI.....98

Lampiran 7 Posisi Gus Dur Belum di Ujung Tanduk.....100

Lampiran 8 Tolak SI, Semua Membebek FPDIP.....101

Lampiran 9 Pernyataan Presiden.....102

Lampiran 10 Foto dengan Narasumber.....103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemakzulan[1] di Indonesia hingga sekarang ini telah terjadi sebanyak dua kali. Salah satunya adalah pemakzulan terhadap presiden keempat Indonesia, yakni KH. Abdurrahman Wahid yang terjadi pada tahun 2001. Alasan dimakzulkannya presiden KH. Abdurrahman Wahid karena presiden KH. Abdurrahman Wahid dianggap telah melakukan tindakan yang melanggar haluan negara dan menghambat proses konstitusional. Hal tersebut dikarenakan ketidakhadiran dan penolakan presiden KH. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001. Selain hal tersebut, presiden KH. Abdurrahman Wahid juga dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi karena pada tanggal 23 Juli 2001 presiden KH. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit Presiden[2] yang berisi tentang pembekuan MPR RI dan pembekuan partai Golkar.[3]

Ancaman akan pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid berawal dari adanya kebijakan-kebijakan presiden KH. Abdurrahman Wahid

---

[1]Menurut KBBI pemakzulan berasal dari kata "makzul" yaitu berhenti memegang jabatan, turun tahta, memakzulkan berarti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, 2002), 704.

[2]Dekrit Presiden adalah keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia V.

[3]Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianggap kontroversial dalam menjalankan pemerintahannya. Pada awal pemerintahannya, presiden KH Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan untuk membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Akibat kebijakan tersebut, hubungan presiden KH Abdurrahman Wahid dengan DPR tidak dapat berjalan secara harmonis. Selain itu, kebijakan presiden KH Abdurrahman Wahid yang sering melakukan *reshuffle*[4] menteri dalam pemerintahannya juga mengakibatkan hubungan dengan DPR semakin menegang, hingga pada akhirnya presiden KH. Abdurrahman Wahid kehilangan dukungan di DPR.[5]

Wacana akan pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid semakin menguat ketika mengemukanya dua kasus yang melibatkan presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Kasus tersebut adalah kasus *Buloggate*[6] dan *Bruneigate*[7]. Akibat persoalan kasus tersebut, anggota DPR yang berjumlah 236 anggota mengusulkan penggunaan hak untuk mengadakan penyelidikan untuk kedua kasus tersebut.

Tidak hanya sampai di situ saja, kebijakan lain yang mengakibatkan hubungan presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan DPR semakin menegang adalah pada tanggal 20 Juli 2001, presiden KH. Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan untuk memberhentikan Jenderal Polisi S.

---

[4]*Reshuffle* adalah mengubah susunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia V.
[5]Zoelva, *Pemakzulan Presiden*, 143.
[6]*Buloggate* merupakan istilah yang dipergunakan dalam kasus penyalahgunaan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog sebessar Rp 35 miliar pada Mei 2000.
[7]*Bruneigate* merupakan istilah yang dipergunakan dalam kasus penyaluran dana Sultan Brunei Darussalam sebesar US$ 2 juta yang dinilai statusnya tidak jelasdan penggunaan dalam keuangan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komisaris Jenderal Polisi Chaerussin Ismail tanpa meminta persetujuan DPR. Hal tersebut melanggar Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR No. VI/MPR 2000 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.[8]

Kondisi perpolitikan di Indonesia semakin memanas, ketika banyak laporan media yang memberitakan hal-hal yang tidak tepat dan negatif mengenai pemerintahan yang dijalankan oleh KH. Abdurrahman Wahid, baik dari media dalam maupun luar negeri.[9] Akibat pemberitaan tersebut, opini masyarakat terhadap pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid bersifat negatif dan mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid.

Dalam jatuhnya presiden KH. Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan, pers juga ikut andil.[10] Hal tersebut dikarenakan pers memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini khalayak. Opini khalayak tersebut dapat memunculkan opini positif ataupun negatif tergantung dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media massa. Meskipun pemberitaan akan pemerintahannya disudutkan oleh pers[11], presiden KH. Abdurrahman Wahid

---

[8]Mundzar Fahman, *Kontroversi Sidang Istimewa MPR 2001* (Surabaya: Lepkiss, 2002), 8

[9]Greg Barton, *Biography Gus Dur The Authorized of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: Lkis, 2011), 457.

[10]Aceng Abdullah, *Press Relations Kiat Berhubungan dengan Media Massa* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 4.

[11]Kata pers berasal dari bahasa Belanda yakni *pers* yang memiliki arti menekan atau mengepres. Sedangkan kata pers dalam bahasa Inggris yakni *press* yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi secara bahasa, pers adalah komunikasi melalui perantara barang cetakan. Namun, dalam perkembangannya kata pers merujuk pada kegiatan jurnalistik baik oleh media elektronik maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ingin mengintervensi pers, melainkan pers dengan mudah dapat mengakses diri presiden dan pemerintahannya. Hal ini karena presiden KH. Abdurrahman Wahid memiliki keyakinan terhadap pentingnya peranan dan kebebasan pers dalam menyuarakan aspirasi terkait jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia dan mengkritik kebijakan pemerintah.

Kebebasan pers di Indonesia tidak terlepas dari peranan presiden KH. Abdurrahman Wahid.[12] Salah satu langkah yang dilakukan presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan dan melindungi kebebasan pers adalah dengan membubarkan Departemen Penerangan (Deppen), yang mana Departemen Penerangan (Deppen) ini memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan pers. Dalam hal ini, Departemen Penerangan (Deppen) mengatur, mengawasi dan mengendalikan informasi dari pers sehingga pers terasa terkekang. Melalui pembubaran Departemen Penerangan (Deppen) tersebut, pers mulai diberikan kebebasan dalam memberikan informasi kepada publik. Selain itu, pers juga mulai ikut mengontrol pemerintahan.

Meski KH. Abdurrahman Wahid memiliki andil besar dalam mendukung kebebasan pers, pemerintahan yang dijalankan oleh KH. Abdurrahman Wahid tidak luput dari kritik pers. Hal tersebut terlihat ketika KH. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden pada tahun 1999, yang

---

media cetak. Dengan demikian pers memiliki dua pengertian, yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Rahmad Harianto, *Dasar Jurnalistik* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 14. Pers dalam arti luas yaitu media cetak dan elektronik yang menyampaikan fakta, pendapat, ulasan, dan gambar kepada masyarakat. Sedangkan secara sempit, pers adalah media cetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin. *Ensiklopedi Nasional Indonesa jilid 13* (Yogyakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), 117.

[12]Barton, *Biografi Gus Dur*, 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana pers tidak lagi menganggap KH. Abdurrahman Wahid sebagai motor penggerak demokrasi, melainkan sebagai seorang pemimpin negara yang dapat berbuat baik dan buruk dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, pers juga tidak pandang bulu dalam memberikan kritik terhadap sikap dan perilaku KH. Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai presiden yang dianggap tidak serius dalam melakukan perubahan. Walaupun KH. Abdurrahman Wahid mendukung kebebasan pers, namun KH. Abdurrahman Wahid juga tetap bersikap kritis terhadap pers.[13]

Keberadaan pers adalah sebagai media penghimpit, atau penekan dalam masyarakat. Dalam aspek sosial pers berfungsi sebagai kontrol sosial. Pers merupakan sebuah media penekan terhadap kebijakan tertentu yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak yang seharusnya menjalankannya. Peranan pers begitu penting dalam aktivitas sosial masyarakat, karena pers merupakan lembaga independen yang menjadi penyambung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Selain itu, pers juga merupakan media yang mampu merangkum aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dalam pemerintahan tersebut dapat terwujud suatu keadilan. Tidak hanya itu saja, pers juga memiliki karakter yang berkaitan dengan berbagai aspek di antaranya, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek-aspek lain yang kompleks. Dalam aspek

[13]Ibid., 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik, pers dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menduduki jabatan dan kepentingan politik.[14]

Selain itu, dalam dunia politik adakalanya suatu media memiliki kepentingan dengan golongan politik tertentu. Tidak hanya itu saja, sikap media juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan lain seperti kepemilikan media, sejarah media, visi dan misi media, dan lain-lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi media karena latar belakang kepemilikan suatu media dapat mengakibatkan pemberitaan surat kabar satu dengan surat kabar lainnya akan berbeda.[15] Salah satu media yang memiliki kepentingan golongan politik tertentu yaitu Surat Kabar Harian Duta Masyarakat.pada tahun 2001.

Surat kabar atau koran adalah lembaran-lembaran kertas yang berisi berita dengan berbagai topik dan lainnya. Surat kabar dapat mempengaruhi pikiran, sikap, dan memberikan perasaan tentram dan keyakinan terhadap hari depan tetapi juga dapat menimbulkan gelisah dan kegoncangan masyarakat.[16] Surat Kabar Duta Masyarakat adalah surat kabar NU yang diprakarsai oleh KH. A. Wahid Hasyim pada tahun 1955 dengan izin terbit pada tahun 1958. Pada awal keberadaannya surat kabar Duta Masyarakat memiliki semboyan "Pendukung Tjita-Tjita Kerdja-Sama Islam–Nasional." Dengan semboyan tersebut, surat kabar Duta Masyarakat memiliki fungsi sebagai sarana

[14]Samsul Wahidin, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 2.
[15]Abdullah, *Press Relations*, 4.
[16]Wahidin, *Dimensi Etika*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publikasi dan aspirasi partai NU serta untuk meminimalisir kekuatan pers PKI dengan surat kabarnya *Harian Rakyat*.[17]

Surat kabar Duta Masyarakat semakin dikenal dan lebih profesional ketika dipimpin oleh Saifuddin Zuhri, yang kemudian dilanjutkan oleh Mahbub Djunaidi. Semboyan surat kabar Duta Masyarakat pun mengalami perubahan yang menjadi "Pembawa Amanat Penderitaan Umat".[18] Pada tahun 1960-1970 surat kabar Duta Masyarakat semakin merambah ke kota-kota besar yang ada di Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 1971 surat kabar ini mengalami mengalami kesulitan dana operasional serta terkena teguran keras akibat kasus pemberitaan hasil pemilu tahun 1971 yang berbeda dengan hasil pemerintah hingga pada akhirnya surat kabar ini berhenti terbit pada tahun 1971.

Setelah lama berhenti terbit sejak tahun 1971, akhirnya pada tahun 1998 surat kabar Duta Masyarakat mulai kembali hadir. Kembalinya surat kabar ini dipelopori oleh Jawa Pos Group yang dipimpin Dahlan Iskan. Pada awal kehadirannya, surat kabar Duta Masyarakat memiliki kedekatan dengan partai PKB sehingga surat kabar ini dianggap sebagai medianya partai PKB. Pada tahun 2001, ketika dinamika politik tidak dapat terkendali dan banyaknya politisi yang menyerang kepemimpinan presiden KH. Abdurrahman Wahid, dengan tujuan menurunkan KH. Abdudurrahman Wahid dari kedudukannya sebagai presiden

[17] Ahmad Zaini, "Dinamika Pers Nahdlatul Ulama (NU) (Studi Sejarah dan Perkembangan Harian Umum Duta Masyarakat Tahun 1954-2016 M)", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 61.
[18] Ibid., 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, surat kabar Duta Masyarakat tampil untuk membela presiden KH. Abdurrahman Wahid.[19]

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini memfokuskan pada tiga pembahasan yakni eksistensi Surat Kabar Duta Masyarakat pada masa pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid, peristiwa pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid, dan upaya Surat Kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid. Dalam kesempatan ini penulis berusaha untuk memberikan fakta-fakta sejarah terkait upaya-upaya yang dilakukan surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid dari isu-isu yang menyudutkan presiden ketika detik-detik pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang ***"Peran Surat Kabar Duta Masyarakat dalam Menolak Pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Tahun 2001".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana eksistensi Surat kabar Duta Masyarakat pada masa pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid?
2. Bagaimana terjadinya peristiwa pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001?

[19]Redaksi, "Tentang Kami Korannya Gus Dur", dalam https://Duta.co/tentang-kami/ (10 september 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana Upaya Surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2001?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan eksistensi surat kabar Duta Masyarakat pada masa pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid.
2. Menjelaskan peristiwa pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001.
3. Menjelaskan upaya surat kabar Duta Masarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2001.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah khazanah pengetahuan tentang peran surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001. Sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk masa yang akan datang.
2. Hasil penelitin ini diharapkan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu sejarah, khususnya sejarah yang mengangkat fenomena komunikasi.
3. Untuk menyajikan fakta sejarah tentang upaya surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Penulisan penelitian memerlukan suatu pendekatan dengan bidang ilmu tertentu. Hal tersebut diperlukan karena dalam menggambarkan suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan. Menurut Sartono Kartodirjo, Pendekatan merupakan dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur mana yang diungkapkan dan lain sebagainnya. Hasil penggambaran penelitian akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai.[20] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, yang mana penelitian ini membahas tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan hanya terjadi sekali.[21] Melalui pendekatan sejarah maka penulis dapat memberikan fakta-fakta sejarah terkait dengan peran surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001.

Dalam menganalisis fakta-fakta yang berkaitan dengan judul penelitian ini, peneliti menggunakan analisis wacana model Teun A. Van Dijk yang disebut sebagai kognisi sosial.[22] Menurut Teun A. Van Dijk analisis wacana tidak hanya didasarkan pada analisis teks, karena teks hanya hasil dari suatu praktek produksi yang harus diamati. Disini analisis

[20]Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.
[21]Lilik Zulaicha, *Metodologi Sejarah I* (Surabaya: UIN Suan Ampel, 2005), 8.
[22]Eriyanto, *Analisis wacana* (Yogyakarta: Lkis, 2003), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wacana terdiri dari tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial dan konteks sosial.

Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah struktur teks dan strategi wacana yang digunakan untuk mempertegas suatu tema. Kemudian pada dimensi kognisi sosial, yang diteliti adalah proses produksi teks berita. Sedangkan Konteks sosial yang diteliti adalah bagaimana struksur sosial, dominasi dan kelompok kekuasaan yang ada di masyarakat dengan pengetahuan yang berkembang di masyarakat.[23]

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian tentang topik yang serupa dengan ”*Peran Surat Kabar Duta Masyarakat dalam Menolak Pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Tahun 2001*” yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaini berjudul “*Dinamika Pers Nahdlatul Ulama (NU) (Studi Sejarah dan Perkembangan Harian Umum Duta Masyarakat Tahun 1954-2016 M)*”. pada tahun 2017, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora.[24] Skripsi ini membahas tentang peranan NU terhadap perkembangan pers dan sejarah perkembangan harian umum Duta Masyarakat dengan kurun waktu 1954-2016 M. Adapun perbedaan pada fokus penelitian ini adalah peranan surat

[23]Ibid., 225.
[24]Ahmad Zaini, “Dinamika Pers Nahdlatul Ulama (NU) (Studi Sejarah dan Perkembangan Harian Umum Duta Masyarakat Tahun 1954-2016 M)”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2001.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad berjudul "*Peran Media Harian Bima Ekspress (BIMEKS) dalam Mengawal Pilkada Kabupaten Bima 2015"*, pada tahun 2016, Jurusan Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.[25] Skripsi ini membahas tentang peran media Harian Bima Ekspress dalam pilkada kabupaten Bima pada tahun 2015. Adapun perbedaan pada fokus penelitian ini terletak pada subyek dan obyek penelitian.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rizal Fawa'id berjudul "*Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid*", pada tahun 2014, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pemberhentian presiden Abdurrahman Wahid ditinjau dari ilmu hukum. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas tentang Pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid dari sudut pandang Surat Kabar Duta Masyarakat dan upaya Surat Kabar dalam menolak pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid.[26]

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *historis* (sejarah). Metode *historis* (sejarah) merupakan proses menguji dan menganalisis setiap rekaman peristiwa masa

[25]Ahmad, "Peran Media Harian Bima Ekspress (BIMEKS) dalam Mengawal Pilkada Kabupaten Bima 2015*"* (skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016).
[26]Ahmad Rizal Fawa'id, "Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lampau berdasarkan data yang diperoleh.[27] Adapun langkah-langkah dalam metode *historis* (sejarah), sebagai berikut:

1. Heuristik (pengumpulan data)

Heuristik atau pengumpulan data adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan sumber-sumber, data-data dan jejak sejarah. Dalam kajian sejarah, sumber merupakan hal yang paling utama dalam menggambarkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.[28] Pada tahap ini, penulis melakukan pengumpulan data yang berupa Surat Kabar Duta Masyarakat di kantor Surat Kabar Duta Masyarakat yang terletak di Graha Astranawa, Jalan Gayungsari Timur No. 35 Surabaya. Disamping itu, penulis juga memperoleh data dari buku dan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta melakukan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data atau sumber asli maupun bukti yang sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Sumber primer sering disebut juga dengan data langsung seperti, orang, lembaga, struktur organisasi dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian "Peran Surat Kabar Duta Masyarakat dalam Menolak Pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Tahun 2001" antara lain:

[27]Nugroho Noto Susanto, *Mengerti Sejarah* (Jakarta:UI Press, 1985), 32.
[28]Zulaicha, *Metodologi Sejarah I*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Surat kabar Duta Masyarakat
2) Choirul Anam

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung atau data pelengkap daripada sumber primer. [29] Sumber sekunder yaitu sumber yang dihasilkan oleh orang yang hidup sezaman, namun tidak terlibat dan tidak menyaksikan secara langsung dalam peristiwa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1) Wawancara Mokhammad Kaiyis
2) Buku yang ditulis oleh Greg Borton, berjudul *Biografi Gus Dur The Autorized Biography of Abdurrahman Wahid*.
3) Buku yang ditulis oleh Hamdan Zoelva, berjudul *Pemakzulan Presiden di Indonesia.*
4) Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaini, berjudul "Dinamika Pers Nahdlatul Ulama (NU) (Studi Sejarah dan Perkembangan Harian Umum Duta Masyarakat Tahun 1954-2016 M)",

2. Kritik sumber

Kritik sumber ialah suatu kegiatan untuk meneliti sumber-sumber yang diperoleh agar memperoleh kejelasan apakah sumber ini kredibel atau tidak dan apakah sumber itu autentik atau tidak. Tahap ini memiliki

[29]Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan untuk memperoleh fakta yang dapat mengantarkan kepada kebenaran ilmiah.[30] Kritik Sumber dibagi menjadi dua, antara lain:

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber. menurut Lilik Zulaicha, keaslian sumber dapat diketahui melalui 5 pertanyaan, yakni: "Kapan sumber itu dibuat?, Dimana Sumber itu dibuat?, Siapa yang membuat sumber itu?, Terbuat dari bahan apakah sumber itu?, Apakah dalam bentuk asli sumber itu dibuat?" [31]

Sumber yang penulis peroleh berupa Surat kabar Duta Masyarakat, sumber ini dibuat menjelang berlangsungnya Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Sumber ini dibuat oleh wartawan Surat kabar Duta Masyarakat. Sumber ini terbuat dari kertas koran dan masih dalam bentuk aslinya.

b. Kritik Intern

Kritik intern merupakan upaya yang dilakukan oleh sejarawan dalam menentukan bahwa isi sumber yang digunakan tersebut cukup dapat dipercaya atau tidak. Dalam melakukan kritik intern, penulis akan membandingkan antara fakta-fakta yang diketahui dari pengalaman pribadi, fakta yang diketahui dari tangan kedua dan fakta-

[30]Aminuddin Kasdi, *Pengantar dalam Studi Suatu Sejarah* (Surabaya: IKIP, 1995), 30.
[31]Lilik Zulaicha, *Metodologi Sejarah I*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta yang tertulis pada zamannya. sumber-sumber yang penulis dapatkan adalah sumber yang dapat dipercaya, karena penulis membandingkan hasil wawancara dengan pelaku sejarah yakni Drs. Choirul Anam dan hasil wawancara dari Mokhammad Kaiyis sebagai orang terdekat Drs. Choirul Anam. Disamping itu, penulis juga menggunakan sumber berupa koran Duta Masyarakat, karena isi koran merupakan representasi dari keadaan pada waktu koran tersebut terbit.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah proses menafsirkan fakta sejarah yang telah ditemukan melalui proses kritik sumber, sehingga akan terkumpul bagian-bagian yang akan menjadi fakta serumpun. Dalam interpretasi ini, dilakukan dengan dua macam, yaitu: analisis (menguraikan), dan sintesis (menyatukan) data.[32]

Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber. Penulis akan berusaha menafsirkan apa yang terdapat dalam data yang ditemukan oleh penulis. Proses yang dilakukan dalam hal ini adalah membandingkan antara data satu dengan data yang lain baik berupa lisan atau tulisan, yang berkaitan tentang pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu penulis menafsirkan bahwa surat kabar Duta Masyarakat melakukan penolakan terhadap pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid melalui pemberitaan yang dianggap memihak presiden, namun upaya yang

[32]Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh surat kabar Duta Masyarakat tidak dapat bersaing dengan media massa yang lain.

4. Historiografi

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam prosedur dalam penelitian. Historiografi adalah penulisan sejarah berupa laporan hasil penelitian. Seluruh laporan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk penulisan sejarah.

Historiografi dalam penelitian ini mengangkat tentang fenomena komunikasi. Pada tahap ini, penulis berusaha menulis secara diakronis, meskipun dalam penelitian ini membahas tentang peristiwa yang terjadi hanya beberapa bulan. Historiografi Penelitian ini dimulai dari heuristik, kritik dan analisis. Kemudian, dengan sumber yang penulis peroleh, penulis menyusun kembali sejarah dalam bentuk skripsi dengan judul "Peran Surat Kabar Duta Masyarakat Dalam Menolak Pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Tahun 2001".

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini, dijabarkan dalam lima bab yang merupakan satu rangkaian sistematis. Hal ini karena bab satu dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan. Untuk mempermudah pembahasan, penulis menjabarkan dalam bentuk per bab. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang garis besar penelitian skripsi. Pada bab ini terbagi dalam delapan sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang eksistensi surat kabar Duta Masyarakat pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab pembahasan yakni sejarah Surat kabar Duta Masyarakat dan kiprah surat kabar Duta Masyarakat pada tahun 2001.

Bab ketiga, menjelaskan tentang peristiwa pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid. Bab ini terdiri dari perjalanan politik KH. Abdurrahman Wahid menuju kursi kepresidenan, alasan terjadinya pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid dan proses pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid.

Bab keempat, berisi tentang upaya surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Pembahasan ini berisi tentang pemberitaan Surat kabar Duta Masyarakat edisi bulan mei sampai juli tahun 2001.

Bab kelima, merupakan penutup. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

EKSISTENSI SURAT KABAR DUTA MASYARAKAT PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID (2001)

A. Sejarah Surat Kabar Duta Masyarakat

Duta Masyarakat merupakan surat kabar Nahdlatul Ulama yang berhaluan Islam. Dalam pendiriannya, surat kabar Duta Masyarakat tidak terlepas dari peranan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Surat kabar Duta Masyarakat berdiri atas inisiatif KH. Abdul Wahid Hasyim, yang mana KH. Abdul Wahid Hasyim merupakan salah satu tokoh sentral dalam PBNU. Penerbitan surat kabar Duta Masyarakat pertama kali dilakukan pada tanggal 2 Januari 1954 di Jakarta dengan nama Duta Masjarakat. Namun, izin terbit untuk surat kabar tersebut baru diperoleh pada tanggal 31 Oktober 1958.

Lokasi kantor surat kabar Duta Masyarakat pada mulanya berada di Jalan Sawah Besar 2R Djakarta. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian kantor surat kabar ini berpindah lokasi ke Jalan Menteng Raya No. 24 Jakarta.[1] Pada awal berdirinya, Duta Masyarakat hanya bermodalkan percetakan tua milik PBNU yang berada di Jalan Sasak No. 23 Surabaya. Percetakan tersebut berada di bawah naungan Yayasan Mu'awanah. Dengan modal Yayasan Mu'awanah, A.A. Achsien, Zainul Arifin, dan Jamaluddin Malik mendirikan PT. Timbul yang kemudian bekerjasama

[1]T & M. Sjureich Sjahril, *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia* (Djakarta: Serikat Penerbit Surat kabar Pusat, 1971), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dangan N.V. Pertjetakan untuk menerbitkan surat kabar Duta Masyarakat. Selain itu, pada awal keberadaan Duta Masyrakat, pimpinan redaksi dipegang oleh Asa Bafagih yang dibantu oleh A. Zakaria, A. Hasan Sutardjo, M. Djunaidi, Dachlan Rasjidi serta Husin Bafagih sebagai staf redaksi.[2]

Awal kemunculan surat kabar Duta Masyarakat terjadi pada era orde lama. Pada era ini merupakan era pers partisan. Pada era tersebut, keberadaan pers memiliki peranan sebagai sarana partai politik. Selain itu, opini media menjadi suara politik dan program kebijakan dari pemilik media, sehingga keberadaan pers dapat mempengaruhi perpolitikan yang ada. Tak terkecuali dengan Duta Masyarakat, yang pada era tersebut juga menjadi media dari partai Nahdlatul Ulama, pasca Nahdlatul Ulama keluar dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan menjadi partai politik sendiri. Sebagai surat kabar dari partai Nahdlatul Ulama, otoritas PBNU terhadap Duta Masyarakat sangatlah dominan, sehingga surat kabar ini menjadi suara partai dan setiap tindakan yang dilakukan oleh Duta Masyarakat selalu berkaitan dengan kebijakan partai NU. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan pihak PBNU sendiri yang menyatakan sebagai berikut.[3]

> Duta Masjarakat adalah satu-satunya surat harian milik kita, yang membawa dan mencerminkan suara partai. Selain itu, pembawa suara dan sikap partai kita yang resmi. Surat kabar Duta Masjarakat

[2]Hamzah, "Duta melalui Masjarakat", dalam www.nu.or.id (10 Oktober 2018).
[3]Ahmad Zaini, "Dinamika Pers Nahdlatul Ulama (NU) (Studi Sejarah dan Perkembangan Harian Umum Duta Masyarakat Tahun 1954-2016 M)", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> juga menggambarkan suasana dan perasaan yang hidup di lingkungan kita, sehingga oleh karenanya maka surat kabar ini dapat dijadikan pedoman dan kompas perjuangan partai dalam batas-batas yang dilakukan sesuai dengan kedudukannya sebagai suatu surat kabar. Dengan demikian, maka perasaan yang hidup dalam partai kita dapat cepat merata diketahui masyarakat, dan itu akan memudahkan langkah yang harus segera diambil oleh kami sebagai Partai NU.

Hal tersebut juga terlihat dari tujuan awal diterbitkannya surat kabar Duta Masyarakat. Tujuan tersebut tercermin dalam surat edaran yang ditujukan kepada Pengurus Cabang NU se-Indonesia yakni sebagai berikut.[4]

> "...sebagai terompet dan alat penghubung diantara kita sehingga kita dapat gambaran yang terang terhadap berbagai persoalan yang timbul dalam berbagai lapangan dan dapat dipegang pula sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi persoalan seperti saat ini..."

Kemudian, sebagai surat kabar partai, Duta Masyarakat memiliki peranan sebagai alat untuk menginformasikan gagasan-gagasan dan aspirasi partai NU menjelang pemilihan umum pada tahun 1955. Hal lainnya, Duta Masyarakat juga berperan sebagai alat propaganda dalam meminimalisir kekuatan surat kabar Harian Rakyat yang berafiliasi dengan PKI. Dengan semboyannya "Pendukung Tjita-Tjita Kerdja Sama Islam-Nasional", surat kabar Duta Masyarakat berusaha untuk menghilangkan atau menengahi arus politik keras antara pihak kiri, pihak kanan, golongan sipil dan militer.

[4]Hairus Salim HS "Duta Masjarakat", dalam www.nu.or.id (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun surat kabar Duta Masyarakat sangat identik sebagai surat kabar politik, tetapi Duta Masyarakat tidak menutup diri untuk memberikan berita yang murni mengenai informasi yang terkait dengan situasi politik, sosial, ekonomi, olahraga dan agama. Selain itu, dalam surat kabar Duta Masyarakat juga memberikan ruang baca untuk anak-anak dan remaja dengan membuat rubrik yang bernama Duta Taruna.[5]

Pada tahun 1958, perkembangan surat kabar Duta masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hanya saja pada tahun tersebut, susunan kepengurusan pada surat kabar Duta Masyarakat mengalami pergantian personil. Pada tahun 1958, Direksi surat kabar Duta Masyarakat dipimpin oleh Z. A. Rahman, sedangkan pimpinan redaksi dipegang oleh Hassan. Setelah masa kepimpinan Z. A. Rahman berakhir, pada tahun 1959 dewan redaksi surat kabar Duta Masyarakat diketuai oleh Saifuddin Zuhri yang beranggotakan Mahbub Djunaidi dan Aminuddin Aziz. Pada masa pimpinan Saifuddin Zuhri, surat kabar Duta Masyarakat mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut terlihat dari semakin dikenalnya surat kabar Duta Masyarakat oleh kalangan masyarakat, selain kalangan NU sendiri. Selain itu, surat kabar Duta Masyarakat juga menjadi surat kabar yang lebih profesional dan benar-benar menjadi lidah partai.

[5]Ahmad Zaini, "Dinamika Pers Nahdlatul Ulama (NU) (Studi Sejarah dan Perkembangan Harian Umum Duta Masyarakat Tahun 1954-2016 M)", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tak berselang lama, surat kabar Duta Masyarakat mengalami pergantian lagi dalam susunan redaksinya. Pada September 1960, Mahbub Djunaidi diangkat menjadi pimpinan redaksi surat kabar Duta Masyarakat. Mahbub Djunaidi memimpin surat kabar Duta Masyarakat selama 10 tahun, yakni mulai tahun 1960 sampai tahun 1970. Dalam periode kepimpinannya, surat kabar Duta Masyarakat menjadi surat kabar yang elegan dan berwibawa. Selain itu, banyak perubahan yang terjadi pada surat Duta Masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi pada masa kepimpinan Mahbub Djunaidi adalah mengubah semboyan surat kabar Duta Masyarakat menjadi "Pembawa Amanat Penderitaan Umat." Hal yang melatarbelakangi perubahan semboyan tersebut adalah pidato presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul "Laksana Malaikat Menyerbu dari Langit, Jalannya Revolusi Kita." Adanya perubahan semboyan tersebut menjadi bentuk dukungan surat kabar Duta Masyarakat terhadap revolusi yang dilakukan oleh presiden Soekarno dalam pemerintahan. Meskipun surat kabar Duta Masyarakat menjadi pendukung presiden Soekarno, kritisme terhadap pemerintahan Soekarno tetap ada.

Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1961 Duta Masyarakat mulai menerbitkan surat kabar edisi mingguan yang bernama Duta Minggu atau disingkat DUMI. Izin terbit untuk surat kabar DUMI diperoleh pada tanggal 1 November 1960 dari Penguasa Perang Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djakarta Raya (PEPERDA). [6] Secara umum, isi surat kabar DUMI tidak berbeda jauh dengan surat kabar lainnya. Hanya saja, pada DUMI unsur kebudayaan islam dan agama lebih ditekankan. Hal tersebut terlihat dari semboyannya, yakni Mengembangkan Kebudayaan – Islam dan Agama.

Perjalanan surat kabar Duta Masyarakat dalam mempertahankan keberadaannya tidak selalu berjalan mulus. Terkadang fase pasang surut dialami surat kabar Duta Masyarakat dalam proses produksinya. Hal tersebut terlihat sejak awal produksi surat kabar Duta Masyarakat, yang mana pada saat itu surat kabar Duta Masyarakat mendapatkan subsidi harga kertas dari pemerintah. Selain itu, 50% dana produksi surat kabar tersebut masih disokong oleh partai. Tidak hanya sampai disitu, pengeluaran dana produksi yang begitu besar tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh. Minimnya pemasukan yang diperoleh Duta Masyrakat dikarenakan minat pembaca terhadap surat kabar Duta Masyarakat masih sedikit, tak terkecuali dengan minat kalangan NU sendiri. Hal tersebut karena kuailtas surat kabar Duta Masyarakat dianggap masih rendah, yang mana pemberitaan yang terdapat pada Duta Masyarakat dianggap kurang mengena ke pembaca.

Dalam mengatasi sedikitnya minat pembaca terhadap surat kabar Duta Masyarakat, partai NU memberikan instruksi kepada anggota partai dan masyarakat Nahdiyin untuk membaca dan berlangganan surat kabar Duta Masyarakat. Melalui upaya tersebut, akhirnya peminat dan hasil

[6]Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan surat kabar Duta Masyarakat mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, surat kabar Duta Masyarakat juga berupaya mendapatkan pemasukan dari iklan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya iklan yang masuk ke surat kabar Duta Masyarakat, salah satu pemasok iklan terbesar di Duta Masyarakat adalah Jamaluddin Malik yang tak lain seorang pengusaha di Indonesia dan merupakan Presdir Duta Masyarakat sendiri. [7]

Seiring berjalannya, peredaran surat kabar Duta Masyarakat mengalami perluasan. Hal tersebut terlihat dari peredaran surat kabar Duta Masyarakat yang merambah ke Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Balikpapan, Kalimantan Selatan dan Bima. [8] Namun, pada tahun 1971 surat kabar Duta Masyarakat kembali mengalami kesulitan dalam hal pendanaan operasional. Hal tersebut dikarenakan banyaknya penyumbang yang tidak lagi menyokong dana ke surat kabar Duta Masyarakat dan semakin sedikitnya pengiklan yang mengiklankan produknya di surat kabar Duta Masyarakat. Tidak hanya sampai disitu, pengekangan yang dilakukan pemerintah terhadap keberadaan pers pada tahun tersebut juga dirasakan oleh surat kabar Duta Masyarakat. Hal tersebut terlihat dari surat teguran yang diterima surat kabar Duta Masyarakat terkait pemberitaan hasil pemilu yang dikeluarkan surat kabar Duta Masyarakat berbeda dengan hasil resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.[9] Akibat pemberitaan yang berbeda tersebut, akhirnya surat kabar Duta Masyarakat

[7]Hairus Salim HS "Duta Masjarakat", dalam www.nu.or.id (10 Oktober 2018).
[8]Ahmad Zaini, "Dinamika Pers Nahdlatul Ulama (NU) (Studi Sejarah dan Perkembangan Harian Umum Duta Masyarakat Tahun 1954-2016 M)", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 63.
[9]Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus berhenti terbit. Menurut hasil temuan di Perpustakaan Nasional, edisi terakhir surat kabar Duta Masyarakat tertanggal 30 Oktober 1971.

Setelah lama vakum selama 27 tahun, tepatnya tahun 1998 surat kabar Duta Masyarakat mulai kembali terbit dengan nama Duta Masyarakat Baru. Terbitnya kembali surat kabar Duta Masyarakat dilatarbelakangi oleh kondisi perpolitikan yang terjadi pada masa awal masa reformasi.[10] Pasca lengsernya presiden Soeharto, masyarakat mendapatkan kebebasan dalam berekspresi. Tidak terkecuali dalam bidang politik, yang mana kebebasan tersebut ditandai dengan lahirnya partai-partai politik menjelang pemilihan presiden tahun 1999. Salah satu partai yang lahir dari dinamika politik tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).[11]

Kembalinya surat kabar Duta Masyarakat juga dipelopori oleh Dahlan Iskan, yang tak lain merupakan pemilik dari Jawa Pos Group. Dalam hal tersebut, Dahlan Iskan berinisitif untuk membantu partai-partai politik dalam mendirikan media, terutama untuk partai yang baru lahir. Keterlibatan Jawa Pos Group dalam surat kabar Duta Masyarakat Baru hanya sebatas fasilitator peralatan seperti komputer dan percetakan, tetapi tidak mencampuri kebijakan redaksional surat kabar tersebut. Disamping itu, Jawa Pos Group juga hanya mendampingi surat kabar tersebut sampai mendapatkan investor yang dapat mengambil alih kepimpinannya.

---

[10]Mokhammad Kaiyis, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2018.
[11]Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur? Misteri di Balik Pelengserannya* (Jogjakarta: Ircisod, 2014), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti awal berdirinya, surat kabar Duta Masyarakat Baru merupakan media partai, yang mana surat kabar tersebut mewakili suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Surat kabar Duta Masyarakat Baru berlokasi di Jalan Kebayoran Lama 17 Jakarta Selatan, yang satu gedung dengan Jawa Pos. Dalam kepengurusannya, pemimpin umum surat kabar Duta Masyarakat dipimpin oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) sebagai pemimpin Redaksi dan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Pemimpin perusahaan Duta Masyarakat Baru.[12] Disamping itu, juga ada Arif Afandi sebagai wakil pemimpin perusahaan dan M. Mas'ud Adnan sebagai redaktur pelaksana.

Pada awal kehadirannya, surat kabar Duta Masyarakat Baru beredar di daerah Jakarta dan sekitarnya. Namun, setelah tiga bulan dari awal peredarannya, surat kabar tersebut mengalami kesulitan dana dalam produksinya. Hal tersebut disebabkan mahalnya biaya produksi dan kirim surat kabar tersebut, yang mana tempat produksi surat kabar Duta Masyarakat Baru terletak di Surabaya. Hal lain yang dihadapi surat kabar Duta Masyarakat adalah sedikitnya pembaca NU yang berada di Jakarta seehingga dana yang masuk kurang mencukupi biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya surat kabar Duta Masyarakat Baru berpindah lokasi di kantor Jawa Pos Surabaya dan aktivitas surat kabar ini berada dikantor PWNU Surabaya di Jalan Darmo.

[12]Eko Yulistyo AF, et al, "Pers di Kibar Panji-Panji Partai". D & R, (31 Oktober 1998), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2000 surat kabar Duta Masyarakat diambil alih oleh Syaifullah Yusuf dan KH. Hasyim Muzadi. Pengambil alihan tersebut terjadi karena biaya operasional Duta Masyarakat begitu besar, sehingga Jawa Pos Group mengalami kesulitan untuk membiayai hal tersebut. Setelah adanya peralihan kepimpinan pada surat kabar Duta Masyarakat, kondisi keuangan yang terdapat pada surat tersebut masih tetap mengalami ketidakstabilan. Hal ini terjadi karena surat kabar Duta Masyarakat belum dapat menghasilkan keuntungan dari pasar serta surat kabar tersebut belum mampu terbit secara mandiri. Dengan kondisi tersebut, kemudian pada tahun 2001 surat kabar Duta Masyarakat dialihkan ke Drs. Choirul Anam dengan kondisi tidak ada biaya dan tidak memiliki kualitas.[13]

Pada awal kepimpinan Drs. Choirul Anam, Duta Masyarakat berkantor di Gedung Bisma yang berada di Jalan Kutisari Indah Barat VI/I Surabaya. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, kantor surat kabar tersebut dipindahkan ke Gedung Astranawa yang berada di Jalan Gayungsari Timur No. 35 Surabaya. Selain itu, pada kepemimpinan Drs. Choirul Anam surat kabar Duta Masyarakat Baru berubah nama menjadi Harian Umum Duta Masyarakat. Dengan perubahan nama tersebut, juga membawa perubahan haluan pada surat kabar tersebut, yang mana surat kabar tersebut menjadi surat kabar komersil pada umumnya. Meski telah menjadi surat kabar komersil, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa

[13]Mokhammad Kaiyis, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat kabar tersebut masih memiliki keterkaitan dengan kepentingan partai.

Hal tersebut dapat dilihat pada era awal kepemimpinan Drs. Choirul Anam, yang mana Duta Masyarakat masih menjadi bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini karena pimpinan Duta Masyarakat yakni Drs. Choirul Anam merupakan ketua Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur. Namun, setelah Drs. Choirul Anam keluar dari Partai Kebangkitan Bangsa dan mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), surat kabar Duta Masyarakat kembali menjadi media partai, yakni media dari PKNU. Keberlangsungan surat kabar Duta Masyarakat sebagai media dari PKNU tidak berlangsung lama. Hal tersebut dikarenakan PKNU sudah tidak aktif di dunia politik sehingga surat kabar Duta Masyarakat kembali menjadi surat kabar komersil pada umumnya.[14]

Perjalanan surat kabar Duta Masyarakat untuk dapat keluar dari kondisi kritis tidaklah mudah. Pada awal kebangkitannya, yakni pada pimpinan redaksi Abdullah Zaim, surat kabar Duta Masyarakat memulai kebangkitannya dengan merekrut para wartawan yang memiliki tujuan yang sama dengan surat kabar Duta Masyarakat, yakni dalam hal pemberdayaan, kebangsaan dan NKRI. Dengan melakukan langkah ini, surat kabar Duta Masyarakat berkeyakinan bahwa melalui kerjasama tersebut akan dapat membawa perubahan yang baik pada Duta

[14]Mokhammad Kaiyis, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat, terutama dalam hal memberikan pemberitaan kepada masyarakat.

Selain itu, dalam memulai penerbitan kembali, surat kabar Duta Masyarakat melakukan proses percetakannya di surat kabar Surya. Namun, proses percetakan surat kabar tersebut mengalami hambatan akibat tunggakan hutang yang dimiliki surat kabar Duta Masyarakat. Untuk dapat mencetak surat kabarnya, akhirnya pihak percetakan memiliki kesepakatan dengan surat kabar Duta Masyarakat bahwa surat kabar Masyarakat harus membayar terlebih dahulu agar dapat melakukan proses percetakan surat kabar tersebut. Dalam melakukan percetakan, setiap harinya Duta Masyarakat mencetak sebanyak sepuluh ribu eksemplar dengan biaya sebesar dua belas juta rupiah. Selain itu, kebutuhan produksi surat kabar Duta Masyarakat menghabiskan biaya sebesar empat ratus juta rupiah.

Akibat biaya yang dikeluarkan untuk percetakan sangat besar, pada tahun 2002 surat kabar Duta Masyarakat merintis PT. Duta Aksara Mulia, yang mana perusahaan tersebut menjadi tempat percetakan dan penerbitan surat kabar Duta Masyarakat. Dalam menunjang hal tersebut, Duta Masyarakat membeli mesin percetakan sendiri dan bekerjasama dengan Paga Utama. Akan tetapi, kualitas hasil percetakan yang dimiliki Duta Masyarakat pada saat itu masih belum bagus. Seiring berkembangnya, pada tahun 2005 Duta Masyarakat mampu membeli mesin percetakan yang lebih canggih dari sebelumnya. Dengan mesin percetakan yang baru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, membuat hasil percetakan surat kabar Duta Masyarakat menjadi lebih bagus.

Terobosan Duta Msyarakat dalam merintis tempat percetakannya sendiri, membuat kondisi keuangan menjadi stabil. Hal tersebut dikarenakan biaya untuk percetakan surat kabar tersebut mengalami penyusutan. Tidak hanya itu, seiring semakin berkembangnya surat kabar Duta Masyarakat, managemen pers, yang terdiri dari redaksi, iklan, dan pemasaran pun menjadi stabil. Hal tersebut terlihat dari konsistennya produksi surat kabar tersebut, serta semakin banyaknya iklan yang berminat mengiklankan produknya ke surat kabar Duta Masyarakat. Meski kondisi surat kabar Duta Masyarakat mulai menunjukkan kestabilan, tetapi pendistribusian surat kabar tersebut masih dilakukan secara mandiri oleh Duta Masyarakat. Akibat hal tersebut, kedatangan surat kabar tersebut mejadi terlambat sehingga banyak dari pembaca yang mengeluhkan keterlambatan tersebut.[15]

Seiring perkembangannya, pada tahun 2009 surat kabar Duta Masyarakat membuka cabang baru. Cabang tersebut berlokasi di Jalan Kramat 6 No. 8 Jakarta Pusat. Adanya cabang baru tersebut, membuat pengoperasian surat kabar tersebut berada di dua tempat, yakni di Surabaya dan Jakarta. Tak berselang lama, yakni pada tahun 2013 keberadaaan cabang Duta Masyarakat yang berlokasi di Jakarta harus

[15]Mokhammad Kaiyis, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberhentikan. Hal tersebut dikarenakan biaya opersional yang dikeluarkan untuk cabang tersebut terlalu besar.

Berselangnya perubahan zaman, dunia penerbitan media massa pun telah memasuki era industrialisasi. Pada era ini, penggunaan akan teknologi digital tidak dapat dielakkan lagi dalam penerbitan suatu media massa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pers harus melakukan pembaharuan dalam menerbitkan pemberitaannya. Oleh karena itu, pers tidak hanya menerbitkan edisi cetak, tatapi juga menerbitkan edisi online serta edisi *e-paper*. Tak terkecuali dengan Duta Masyarakat yang juga mengikuti perkembangan tekhnologi dan dibuktikan dengan kehadiran Duta.co sebagai media onlinenya surat kabar Duta Masyarakat.

Keberadaan Duta.co sebagai sarana surat kabar Duta Masyarakat membawa sisi positif dalam menyebarkan suatu pemberitaan, karena Duta.co dapat menjangkau pembaca yang jauh dari jangkauan surat kabar cetak Duta Masyarakat. Disamping itu, melalui Duta.co para pembaca dapat dengan mudah mengakses suatu pemberitaan dimana pun mereka berada. Akan tetapi, meski Duta Masyarakat telah menerbitkan edisi onlinenya, edisi cetak untuk surat kabar tersebut masih tetap ditertibkan. Hal ini dilakukan karena biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Duta Masyarakat berasal dari iklan yang masuk pada edisi cetak surat kabar tersebut.[16]

[16]Mokhammad Kaiyis, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disisi lain, perkembangan akan era industrialisasi juga menimbulkan persaingan yang ketat antar media massa lainnya. Hal tersebut mengartikan bahwa media massa harus memperoleh keuntungan agar keberadaan media tersebut dapat bertahan, yang mana pendapatan pada era tersebut pengoperasian suatu media memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam mengatasi masalah tersebut, Drs. Choirul Anam selaku pimpinan Duta Masyarakat melakukan pembenahan terhadap konten beritanya. Selain itu, pembenahan juga dilakukan pada tampilan surat kabar Duta Masyarakat yang mana menurut Drs. Choirul Anam seiring perkembangan zaman surat kabar tidak lagi disebut sebagai *newspaper*, melainkan sebagai *viewpaper*. Seiring pembenahan tersebut, penampilan yang dimiliki Duta Masyarakat menjadi terlihat lebih cantik, dinamis, tanpa meninggalkan citranya sebagai surat kabar NU. Disamping itu, berkat upaya pembenahan tersebut, pada akhirnya sejak Februari 2014 surat kabar Duta Masyarakat sudah dapat hidup sendiri tanpa adanya subsidi.[17]

Hingga sekarang ini, kepimpinan surat kabar Duta masyarakat masih dipegang oleh Drs. Choirul Anam dengan slogannya adalah "Suara Hati Nurani Rakyat." Selain itu, visi dan misi yang dimiliki Duta Masyarakat adalah sebagai berikut:

Visi Duta Masyarakat:

[17]Choirul Anam, *Wawancara*, Surabaya, 16 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Menjadikan media ini sebagai sumber informasi positif bagi umat Islam khususnya dan seluruh bangsa Indonesia umumnya sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, berkarakter Islami menuju negeri yang *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*".

Misi Duta Masyarakat:

> "Mengajak pembaca berpikir positif, serta ikut aktif dalam gerakan dakwah Islam, tentu dengan pola informasi dan teknik jurnalistik yang benar. Meningkatkan fungsi dan peran Duta Masyarakat dalam penyebarluasan nilai-nilai Islam. menjaga dan mempertahankan nilai-nilai ahlussunnah wal Jamaah. Dengan misi tersebut Duta Masyarakat wajib memberikan space khusus rubrik religi".

B. Kiprah Surat Kabar Duta Masyarakat Pada Tahun 2001

Keberadaan pers pada suatu negara memiliki peranan penting dalam proses demokrasi. Seiring perkembangnya, pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi, setelah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Drs. M. Sobary MA selaku pimpinan umum LKBN *Antara* yang mengatakan pers merupakan pilar demokrasi yang berfungsi sebagai kekuatan kontrol sosial masyarakat untuk memperhatikan sikap para pemimpin pemerintahan dan sebagai tempat mengkritik para pemimpin bangsa.[18]

Di Indonesia, kebebasan pers dimulai sejak era reformasi. Lahirnya kebebasan pers, bermula dari dihapuskannya SIUPP (Surat Izin Usaha Perusahaan Pers) pada era awal reformasi. Penghapusan tersebut dilakukan karena SIUPP dianggap telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Kemudian, kebebasan pers dipertegas dengan dikeluarkannya

[18]Redaksi, "Koran jangan hanya mengejar uang". Duta Masyarakat (8 Mei 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski pers telah mendapatkan kebebasannya pada saat tersebut, tetapi pers merasa bahwa bayangan akan otoritarianisme pemerintah terhadap masih ada. Hal tersebut terlihat dari masih adanya oknum-oknum bekas rezim Soeharto yang berkuasa.

Tak berselang lama, pada tanggal 20 Oktober 1999 kepimpinan pemerintahan Indonesia dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid. Pada era kepimpinan KH. Abdurrahman Wahid, pers benar-benar mendapatkan kebebasannya. Hal tersebut, tak terlepas dari kebijakan KH. Abdurrahman Wahid yang membubarkan Departemen Penerangan (Deppen), yang mana keberadaan Deppen dianggap bertentangan dengan konsep keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat. Selain itu, Deppen juga dianggap menjadi lembaga propaganda pemerintah dan lembaga pembredelan media serta membungkam suara publik pada masa pemerintahan sebelumnya.[19] Bahkan, Wartawan Indonesia dalam acara diskusi Mahasiswa jurusan jurnalistik Internasional Universitas Monash Australia mengatakan bahwa pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, pers Indonesia sedang menikmati kebebasan. Kondisi ini berbeda dengan pers dimasa pemerintahan presiden Soeharto. Edi Utama, pimpinan kelompok tersebut, mengatakan bahwa:[20]

> "Kontrol yang ketat di era Soeharto tidak akan terulang lagi di Indonesia. Diera Soeharto ada istilah "tiga tabu" dalam

[19]Cahyo, *Salah Apakah*, 57.
[20]Redaksi, "Pers Indonesia didiskusikan mahasiswa JI", Duta Masyarakat (11 Mei 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pemberitaan pers Indonesia waktu itu. Tiga tabu adalah pers Indonesia tidak bisa dengan mudah untuk menulis sekitar Soeharto, keluarga dan kekayaannya lalu cerita mendalam tentang militer dan ketiga tentang Suku, Ras, dan Antar golongan (RAS)."

Setelah dibubarkannya SIUPP dan Deppen, kebebasan pers mulai terbuka lebar. Dunia pers tidak lagi takut pada ancaman tentara dan kontrol pemerintah, melainkan pers memiliki ruang gerak yang bebas dalam memberitakan suatu berita. Namun, seiring kebebasan yang didapatkan, pers menjadi kelewat kebablasan. Hal tersebut membuat ketakutan bahwa dikemudian hari pers akan menjadi sarana politik. Kekhawatiran tersebut juga diungkapkan oleh Pengamat komunikasi, Ade Armando yang mengatakan bahwa pers akan menjadi alat politik sehingga terjadi konspirasi untuk menghabisi lawan politik.[21] Kemudian, hal tersebut juga dipertegas oleh pernyataan Prof. Dean, Guru Besar Ilmu Jurnalistik Universitas Mission, yang termuat dalam surat kabar Duta Masyarakat edisi Jum'at, 12 November 1999. Menurut Prof. Dean, di Indonesia sedang terjadi proses demokrasi dan perubahan besar-besaran dalam berdemokrasi. Demokrasi yang bebas akan terjadi di negara yang memiliki kebebasan dunia pers. Jika pada masa pemerintahan Soeharto ada campur tangan tentara dan pemerintah, maka pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid berhadapan dengan kekuatan pers pendukung partai politik.[22]

[21]Redaksi. "Ada kecenderungan pers menjadi mesin politik", Duta Masyarakat (23 Mei 2001)
[22]Redaksi, "Kekuatan Parpol ancaman baru dunia pers", Duta Masyarakat (Jumat 12 november 1999)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring waktu, pers berhadapan dengan kekuatan politik. Hal tersebut terjadi ketika detik-detik pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid. Pada penghujung akhir masa pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid, kondisi perpolitikan di Indonesia mengalami gejolak. Hal tersebut, diakibatkan pengaruh akan kekuatan partai Golkar, perangkat Orde Baru, dan kelompok Islam garis keras dalam pemerintahan pada saat itu. Melihat persoalan yang terjadi pada saat itu, pers pun tidak luput memberitakan kondisi tersebut. Namun, pemberitaan yang dilakukan pers cenderung tidak seimbang. Hal tersebut terlihat dari disudutkannya presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam pemberitaan tersebut.

Ketidakseimbangan berita yang ditampilkan pers pada saat tersebut, tidak terlepas dari adanya monopoli pemegang saham pers tersebut. Hampir semua media cetak dan pertelevisian yang ada di ibukota memiliki keterkaitan dengan cendana. Kecenderungan pers yang berat sebelah terhadap pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid, terlihat ketika terjadinya kontroversi peristiwa penonaktifan Bimantoro. Pada saat memberitakan peristiwa tersebut, tayangan akan keterangan dari presiden hanya dibacakan oleh penyiar serta gambar dimacetkan sehingga tidak ada suara presiden dalam penayangan berita tersebut. Sebaliknya, ketika menayangkan keterangan Bimantoro dan pengamat yang sudah dipilih, penayangan berita tersebut memakan waktu yang lebih banyak. Akibat pemberitaan yang berat sebelah tersebut, mengakibatkan pembunuhan terhadap karakter kepala negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak sampai situ, keberpihakan pers juga terlihat ketika terjadinya perselisihan antara presiden dan parlemen. Hal tersebut terlihat ketika pelaksanaan sidang parlemen terkait *bulogate* dan *bruneigate* disiarkan secara langsung, pers mengalihkan perhatian berita tersebut dengan menyiarkan aksi demonstrasi mahasiswa secara langsung juga. Tidak hanya itu, keberpihakan pers juga terlihat dari banyaknya tayangan acara talkshow yang menampilkan orang yang bersebrangan dengan presiden. Disamping itu, ketika presiden KH. Abdurrahman Wahid melakukan pertemuan dengan pengusaha di jalan Irian Menteng Jakarta, media memberitakan hal tersebut sebagai bentuk kolusi seorang presiden dengan Anthony Salim dan Prajogo Pangestu. Padahal, menurut presiden KH. Abdurrahman Wahid, pertemuan tersebut untuk membicarakan tentang perbaikan ekonomi.[23]

Seiring banyaknya pemberitaan miring yang dikeluarkan oleh pers, presiden KH. Abdurrahman Wahid merasa kecewa terhadap media. Kekecewaan tersebut terlihat dari perkataan presiden KH. Abdurrahman yang mengatakan bahwa media menyajikan informasi tidak tepat yang bisa membuat masyarakat bodoh. Kemudian, Presiden KH. Abdurrahman Wahid juga menilai bahwa media hanya mengejar sensasional dengan membombardir kisah dirinya dan Aryani Sitepu.

Kekecewaan presiden KH. Abdurrahman Wahid terhadap media terus berlanjut. Hal tersebut terlihat dari sindiran presiden terhadap media,

[23]Redaksi, “Media sibuk mengepung gus dur”, Duta Masyarakat (11 juni 2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana peresiden membandingkan media Indonesia dengan media Amerika yang tidak secara detail memberitakan skandal Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Selain itu, dalam pembukaan seminar Ethics in Journalism pada bulan Juli di Jakarta, presiden KH. Abdurrahman Wahid juga mengatakan bahwa media memiliki pihak-pihak yang ingin mempertahankan *status quo*. Pembicaraan akan hal tersebut mengarah kepada keluarga presiden Soeharto, yang mana keluarga tersebut mendominasi kepemilikan stasiun televisi swasta di Indonesia. Kekecewaan akan hal tersebut juga dirasakan oleh Effendy Choirie dari PKB. Effendy Choirie menilai bahwa televisi adalah provokator untuk menjatuhkan presiden KH. Abdurrahman Wahid.[24]

Karena kecewa dengan sikap pers yang sering menyudutkannya, akhirnya presiden KH. Abdurrahman Wahid pun bersikap dingin terhadap pers. Hal tersebut terlihat dari sikap presiden yang tidak ingin diwawancarai oleh pers. Meski begitu, hal tersebut tidak mengurangi keyakinan presiden KH. Abdurrahman Wahid terhadap pentingnya peranan pers dalam proses demokrasi. Bahkan, presiden KH. Abdurrahman Wahid memposisikan pers sebagai salah satu dari 8 kelompok strategis yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia, diantaranya adalah birokrasi, partai politik, pers, pengusaha, LSM, tentara, Ormas, dan kelompok profesi.

[24]Redaksi, "Media Sibuk Mengepung Gus Dur", Duta Masyarakat (11 juni 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjelang terjadinya pemakzulan presiden Abdurrahman Wahid, yakni pada Juli 2001, pers tak ubahnya menjadi lawan politik presiden Abdurrahman Wahid. Dalam hal itu, pers terus-menerus menampilkan berita-berita yang negatif tentang pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid. Pemberitaaan pers yang bertubi-tubi tersebut, tak pelak menciptakan dan membangun opini publik yang negatif tentang presiden KH. Abdurrahman Wahid dan kelompoknya. Konfrontasi media terhadap presiden KH. Abdurrahman Wahid pun mencapai puncaknya pada akhir Juli 2001, yakni ketika Sidang Istimewa MPR untuk menjatuhkan Gus Dur dilaksanakan.[25] Meski banyak media yang menampilkan dukungannya terhadap pemakzulan tersebut, tetapi tidak halnya dengan surat kabar Duta Masyarakat, yang mana surat kabar tersebut berani tampil untuk menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid.[26]

Pada saat tersebut, surat kabar Duta Masyarakat merupakan satu-satunya surat kabar yang setiap harinya tampil membela presiden KH. Abdurrahman Wahid. Bagi surat kabar Duta Masyarakat, presiden KH. Abdurrahman Wahid merupakan sosok presiden yang mampu memberikan keteladan bagi masyarakat. Hal tersebut terlihat dari usaha presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik, beradab, dan menjunjung tinggi keberagaman. Disamping itu, KH. Abdurrahman Wahid juga memiliki agenda perjuangan yang

[25]Agus Sudibyo "Hubungan Harmonis Gus Dur dan Sejarah yang Tak Terulang", dalam https://agussudibyo.wordpress.com (10 Oktober 2018).
[26]Redaksi "Tentang Kami Korannya Gus Dur", dalam https://Duta.co/tentang-kami/ (10 November 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan oleh bangsa Indonesia di bidang sosial, politik, agama dan tatanan masyarakat atau negara. Selain itu, misi yang diperjuangkan presiden KH. Abdurrahman dalam permerintahannya, yaitu demokrasi dan penegakan hukum serta pluralisme dan toleransi.[27]

Dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid, surat kabar Duta Masyarakat sebagai media massa berusaha membangun opini masyarakat dengan menyebarkan pemberitaan yang benar dan melakukan eksplorasi dari para pakar hukum tata negara bahwa pelengseran presiden KH. Abdurrahman Wahid berlawanan dengan konstitusi. Namun, kekuatan suara yang dimiliki surat kabar Duta Masyarakat tidak terlalu kuat sehingga surat kabar Duta Masyarakat masih kalah dengan media massa besar lainnya. Hal tersebut dikarenakan surat kabar Duta Masyarakat belum memiliki media online sehingga informasi yang diberitakan tidak tersebar secara luas, serta Duta Masyarakat tidak dapat bersaing dengan media-media lainnya yang lebih berkuasa. Disamping itu, surat kabar Duta Masyarakat hanya berperan sebagai peredam kesalahpahaman antara presiden KH. Abdurrahman Wahid dan pihak-pihak lain. Meski surat kabar Duta Masyarakat berusaha membela presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam pemberitaannya, tetapi pengaruh Duta Masyarakat dalam membangun opini publik masih relatif kecil, sehingga Duta Masyarakat tidak dapat berbuat banyak ketika presiden KH. Abdurrahman Wahid dimakzulkan.

[27]Choirul Anam, *Wawancara*, Surabaya, 16 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan yang dimiliki Duta Masyarakat dengan KH. Abdurrahman Wahid sangatlah erat. Hal tersebut dikarenakan KH. Abdurrahman Wahid pernah menjabat sebagai komisaris tertinggi pada surat kabar tersebut. Selain itu, Drs. Choirul Anam sebagai pemilik Duta Masyarakat juga memiliki kedekatan secara pribadi dengan KH. Abdurrahman Wahid, yang mana keduanya pernah menjadi kader partai PKB. Seiring dekatannya hubungan Duta Masyarakat dengan KH. Abdurrahman Wahid, membuat surat kabar Duta Masyarakat dianggap sebagai "Korannya Gus Dur". Hal tersebut tak terlepas dari peranan surat kabar Duta Masyarakat dalam menyuarakan perjuangan-perjuangan KH. Abdurrahman Wahid dan menyuarakan suara-suara yang diperjuangkan KH. Abdurrahman Wahid. Selain itu, KH. Abdurrahman Wahid memiliki kontribusi yang luar biasa dalam menghidupkan surat kabar Duta Masyarakat melalui tulisan-tulisannya. Setiap seminggu sekali tepatnya pada hari senin dan dimanapun berada KH. Abdurrahman Wahid mengirimkan tulisannya ke surat kabar Duta Masyarakat. Meskipun tulisannya tidak panjang, akan tetapi runtut.[28]

[28]Choirul Anam, *Wawancara*, Surabaya, 16 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERISTIWA PEMAKZULAN PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID TAHUN 2001

A. Perjalanan Politik KH. Abdurrahman Wahid Menuju Kursi Kepresidenan

Jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 membawa perubahan dalam perpolitikan di Indonesia. Setelah mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan, Bachruddin Jusuf Habibie selaku wakil presiden menggantikan jabatan Soeharto sebagai presiden. Namun, masa jabatan B. J. Habibie sebagai Presiden Indonesia tidak berjalan lama. Kemudian pada bulan ke 13 masa jabatan B. J. Habibie, muncul desakan agar pemilihan umum (pemilu) segera dilaksanakan. Salah satu yang menjadi alasan untuk mempercepat pelaksanaan pemilu adalah untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari publik, termasuk dunia Internasional. Hal tersebut karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan hasil dari pemilu pada tahun 1997 sudah dianggap tidak memiliki kepercayaan dari publik. Pelaksanaan pemilu yang dipercepat ini, diharapkan dapat memulihkan kondisi Indonesia yang mengalami multikrisis.[1] Menjawab desakan tersebut, akhirnya Presiden B. J. Habibie menetapkan penyelenggaaan pemilihan umum (pemilu) tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999.

[1]Agus N. Cahyo, *Salah Apakah*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan dipercepatnya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), maka keanggotaan lembaga legislatif (DPR dan MPR) pun harus digantikan sebelum selesai masa kerjanya. Selain itu, masa jabatan Presiden Bachruddin Jusuf Habibie yang harusnya berlangsung hingga tahun 2003 harus dipangkas. Lembaga yang berwenang untuk menanggani pemilihan umum (pemilu) ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pemilihan umum (pemilu) tersebut diikuti sebanyak 48 partai politik.[2]

Berdasarkan keputusan KPU mengenai hasil dari pemilihan umum (pemilu) pada tahun 1999, menunjukkan bahwa terdapat lima partai besar yang menempati 417 kursi DPR atau 90,26% dari 462 kursi DPR yang diperebutkan. Partai-partai tersebut adalah PDIP dengan meraih suara 35.689.073 suara atau 33,74%; Golkar memperoleh 23.741.758 suaa atau 22,44%; PKB dengan suara 13.336.982 suara 12,61%; PPP dengan meraih suara 11.329.905 suara atau 10,71%; dan PAN memperoleh suara sebanyak 7.528.956 suara atau 7,12%.[3]Dari hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, kemudian disusunlah keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berjumlah 700 orang yang tersusun dari 500 orang yang berasal dari DPR dan 200 orang lainnya berasal dari seleksi Utusan Daerah dan Utusan Golongan.[4]

Tidak berselang lama, setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah ditetapkan, Sidang

[2]Ibid., 44.
[3]Ibid., 51.
[4]Abdul Munir Mulkhan, *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: Kompas, 2010), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umum MPR dilaksanakan. Sidang Umum MPR dilaksanakan sejak tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum tersebut, diperoleh keputusan untuk menetapkan Amien Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tandjung sebagai ketua DPR.[5]

Setelah penetapan ketua MPR dan DPR, agenda selanjutnya dalam Sidang Umum MPR tersebut adalah pemilihan presiden Republik Indonesia yang baru. Dalam menempatkan pewakilannya dalam pemilihan presiden, partai-patai politik pun melakukan koalisi agar perwakilannya tersebut dapat menjadi presiden selanjutnya. Salah satunya adalah gerakan Poros Tengah yang dipimpin oleh Ketua MPR RI, yakni Amien Rais. Poros Tengah merupakan koalisi partai-partai muslim yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), dan Partai Bulan Bintang (PBB).[6]

Pada tanggal 7 Oktober 1999, Amin Rais dan Poros Tengah secara resmi mengajukan KH. Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden pada Sidang Umum (SU) MPR RI tahun 1999.[7] Dalam pemilihan presiden tersebut, terdapat tiga calon presiden yang diajukan partai-partai politik, yaitu KH. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Yuzril Ihza Mahendra. Hal tersebut menyusul keputusan Sidang Umum MPR yang menolak pidato pertanggungjawaban B.J Habibie pada tanggal 19 Oktober

[5]Cahyo, *Salah Apakah*, 52.
[6]Barton, Biografi Gus Dur, 275
[7]Ibid., 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1999 dengan hasil 355 suara menolak, 322 suara menerima, 9 suara abstain, dan 4 suara tidak sah dari 690 suara yang ada. Dengan ditolaknya pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie tersebut, maka B.J. Habibie pun menyatakan mundur dari pencalonan presiden.

Detik-detik sebelum dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih presiden tanggal 20 Oktober 1999, Yuzril Ihza Mahendra menyatakan untuk mengundurkan diri dari pencalonan presiden. Dengan mundurnya Yuzril Ihza Mahendra, maka calon presiden RI hanya menyisakan dua calon yang akan maju dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan pada Sidang Umum MPR. Kedua calon tersebut adalah Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pemilihan presiden dilaksanakan secara demokratis dan transparan. Dari hasil Sidang Umum MPR tersebut, diperoleh hasil bahwa KH. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat dengan perolehan suara sebanyak 373, sedangkan Megawati Soekarno Putri meraih 313 suara.[8]

Selang sehari setelah pemilihan presiden, yakni pada tanggal 21 Oktober 1999 KH. Abdurrahman Wahid pun secara resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia keempat dengan wakil presidennya adalah Megawati Soekarno Putri.[9] KH. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden RI dengan masa periode 1999-2004.[10] Dalam pemerintahannya, KH.

[8]Mulkhan, *Perjalanan Politik*, 32.
[9]Anom Whani Wicaksana, *Gus Dur Jejak Bijak Sang Guru Bangsa* (Yogyakarta: C-Klil Media, 2018), 49
[10] Mulkhan, *Perjalanan Politik*,33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Wahid membentuk kabinet kerjanya yang bernama Kabinet Persatuan Nasional yang diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999.

Setelah diangkat menjadi presiden, gaya kepimpinan KH. Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari kebiasaanya yang bersikap nyeleneh. Namun seiring berjalannya pemerintahannya, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh KH. Abdurrahman Wahid cenderung dianggap kontroversial sehingga banyak dari pihak yang mengritik pemerintahan yang dijalankan KH. Abdurrahman Wahid terutama dari berbagai pihak partai yang berada di kursi parlemen. Banyak dari mereka yang menginginkan KH. Abdurrahman Wahid untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang merasa tidak puas dengan kinerja KH. Abdurrahman Wahid yang dianggap semaunya sendiri tanpa memperhatikan aspirasi dari anggota kabinet yang dipimpinnya.[11]

Akibat banyaknya kontroversial yang dilakukan KH. Abdurrahman Wahid dalam pemerintahannya dan banyaknya sejumlah pihak yang menginginkan KH. Abdurrahman Wahid untuk berhenti menjadi presiden, pada akhirnya KH. Abdurrahman Wahid harus dimakzulkan melalui keputusan Sidang Istimewa MPR RI yang dipimpin oleh Amien Rais selaku ketua MPR RI pada tanggal 21 Juli 2001.[12]

[11]Ibid., 67.
[12] Wicaksana, *Gus Dur Jejak Bijak*,55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Alasan Memakzulkan Presiden KH. Abdurrahman Wahid

Pemerintahan yang dijalankan oleh presiden KH. Abdurrahman Wahid banyak diwarnai dengan kontroversi. Hal tersebut tidak terlepas dari sosok KH. Abdurrahman Wahid yang memiliki sikap *nyeleneh* dan tidak dapat diprediksi dalam memimpin pemerintahan. Selain itu, dalam mengambil kebijakan-kebijakan presiden KH. Abdurrahman Wahid tak luput dari kritikan berbagai pihak, banyak pihak yang menganggap bahwa kebijakan yang diputuskan oleh presiden KH. Abdurrahman Wahid dilakukan seenaknya sendiri tanpa meminta pertimbangan dari angota kabinetnya maupun anggota parlemen yang ada.

Sejak awal pemerintahan, kebijakan presiden KH. Abdurrahman Wahid telah cenderung kontroversial. Kebijakan pertama yang dilakukan KH. Abdurrahman Wahid setelah menjadi presiden adalah membersihkan sisa-sisa peninggalan Orde Baru dengan menghapus Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos).[13] Alasan presiden KH. Abdurrahman Wahid menghapus Deppen dan Depsos adalah bahwa kedua departemen tersebut dianggap tidak efektif, yang mana Departemen Sosial dianggap menjadi sarang yang berpotensi korupsi, dan Departemen Penerangan dianggap menjadi lembaga propaganda pemerintah serta menjadi lembaga pembredelan media dan membungkan suara publik, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan konsep keterbukan informasi dan kebebasan berpendapat pada era

[13]Cahyo, *Salah Apakah*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reformasi.[14] Selain itu, alasan lainnya penghapusan Deppen dan Depsos adalah untuk perambingan struktur pemerintahan.[15] Menurut presiden KH. Abdurrahman Wahid kegiatan yang dilakukan kedua departemen tersebut dapat ditanggani sendiri oleh masyarakat. Hal tersebut diperjelas oleh presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam menanggapi pertanyaan dari anggota DPR pada sidang paripurna, yang mana KH. Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa pembubaran Deppen dan Depsos karena tugas-tugas penerangan dan masalah sosial dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian otonomi yang luas.[16] Selain itu, masalah seperti itu bukan lagi dimonopoli oleh pemerintah pusat apalagi sampai didepartemenkan.

Tidak sampai disitu, dalam Sidang Paripurna DPR yang membahas terkait pembubaran Deppen dan Depsos, kontroversi lain yang ditimbulkan presiden KH. Abdurrahman Wahid adalah tekait pernyataan presiden KH. Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa DPR tidak ubahnya sebuah taman kanak-kanak. Presiden KH. Abdurrahman Wahid mengatakan hal tersebut karena presiden KH. Abdurrahman Wahid mengkritik pendapat anggota DPR yang kebanyakan memberikan uneg-uneg daripada memberikan pendapat yang lebih serius.[17] Akibat pernyataan yang dilontarkan presiden KH. Abdurrahman Wahid tersebut, anggota DPR merasa geram dan merasa dihina. Selain itu, karena hinaan itu pula hubungan presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan DPR mulai menegang.

---

[14]Ibid., 58
[15]Wicaksana, *Gus Dur Jejak Bijak*, 66.
[16]Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur*, 66
[17]Ibid., 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontroversi lain yang yang dilakukan oleh presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam pemerintahannya adalah seringnya melakukan perjalanan keluar negeri. Karena seringnya melakukan kunjungan luar negeri tersebut, presiden KH. Abdurrahman Wahid mendapatkan kritikan dari Ketua MPR (Amien Rais) dan Ketua DPR (Akbar Tandjung).[18] Mereka mengkritik bahwa masih ada banyak masalah dalam negeri yang perlu dibenahi, daripada harus sering melakukan urusan luar negeri. Menjawab kritikan ini, presiden KH. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa kegiatan ke luar negeri adalah untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, menarik investasi, menerima penghargaan, berobat, serta menghadiri forum dunia, seperti forum ekonomi dunia maupun pertemuan negara G-77.

Adapun kunjungan-kunjungan luar negeri yang dilakukan presiden KH. Abdurrahman Wahid di antaranya adalah kunjungan ke Davos, Swiss yang mana untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia. Setelah itu, dalam tengah pejalannannya pulang dari Swiss, presiden KH. Abdurrahman Wahid pun mengunjungi Arab Saudi, dengan harapan memperoleh bantuan keuangan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Kunjungan lainnya, presiden KH. Abdurrahman Wahid pun pergi ke London, Paris, Amsterdam, Berlin, dan Roma yang mana tujuan dari kunjungan tesebut adalah untuk memperoleh dukungan dari Eopa, baik secara ekonomi maupun politik untuk pelaksanaan reformasi di Indonesia. Kemudian, dalam perjalanan pulang dari perjalanan ke Eropa, presiden KH. Abdurrahman Wahid melanjutkan kunjungan ke New

[18]Ibid., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Delhi, Seoul, Bangkok, dan Brunei.[19] Tidak sampai disitu, Negara lain yang dikunjungi presiden KH. Abdurrahman Wahid adalah Timor Leste, Afrika Selatan, kemudian Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, Meksiko, Hongkong, Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Iran, Pakistan, dan Mesir.[20]

Selain kontroversi terkait kunjungan-kunjungan presiden KH. Abdurrahman Wahid ke luar negeri, hal lain yang menjadi kontoversial adalah sikap presiden KH. Abdurrahman Wahid yang semaunya sendiri dalam menempatkanmenteri-menterinya dalam kabinet. Hal tersebut terlihat dari pengangkatan Dr. As. Hikam, seorang ahli sastra yang ditempatkan di Kementerian Riset dan Teknologi. Selain itu, terdapat seorang Jenderal bernama Soesilo Bambang Yudhoyono yang diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Energi. Selanjutnya, Al Hilal yang merupakan seorang sarjana Teknik Perminyakan dari ITB diangkat menjadi Menteri Transmigrasi, Sarwono Kusumaatmaja yang ditempatkan sebagai Menteri Kelautan, serta Erna Wintular ditempatkan sebagai Menteri Pemukiman.[21]Dalam penempatan posisi para menteri yang dilakukan presiden KH. Abdurrahman Wahid itu pun dinilai jauh dari harapan, yang mana mereka yang masuk dalam jajaran menteri kabinet presiden KH. Abdurrahman Wahid dianggap hanya orang-orang yang setia saja kepada presiden KH. Abdurrahman Wahid.

Selain itu, adanya pemecatan dan pergantian menteri yang sering dilakukan presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam pemerintahannya juga

[19]Barton, Biografi Gus Dur, 387.
[20]Bondan Gunawan, *Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur* (Jakarta: Kompas, 2018), 246
[21]Cahyo, *Salah Apakah*, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinilai kontoversi. Dalam memecat dan mengganti menteri terkadang presiden KH. Abdurrahman Wahid tidak meminta persetujuan dari Megawati Soekarno Putri selaku wakil presiden RI. *Reshuffle* dalam kabinet presiden KH. Abdurrahman Wahid sering berkali-kali dilakukan dengan jangka waktu yang singkat. Sebulan setelah Kabinet Pesatuan Nasional diumumkan, Hamzah Haz yang merupakan Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.[22] Hal tersebut karena presiden KH. Abdurrahman Wahid menuduh beberapa menteri dalam kabinetnya melakukan korupsi selama presiden berada di Amerika Serikat. Kemudian, juga ada Jendral Wiranto yang diminta mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan alasan sebagai halangan rencana reformasi militer dan tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto. Setelah Wiranto dinonaktifkan sebagai Menteri Politik dan Keamanan, jabatan tersebut kemudian diambil alih oleh Juwono Sudarsono.[23]

Tidak hanya itu saja, pada April tahun 2000 juga terjadi pemecatan yang menimpa Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan, yakni Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN, yakni Laksamana Sukardi. Alasan dipecatnya kedua menteri tersebut karena keduanya diduga telibat dalam kasus korupsi. [24] Pemecatan kedua menteri tersebut pun mengakibatkan hubungan presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan partai Golkar dan PDIP memburuk, yang mana diketahui bahwa Jusuf Kalla berasal dari Golkar dan

[22]Ibid., 99.
[23]Gunawan, *Hari-Hari Terakhir*, 226.
[24]Barton, Biografi Gus Dur, 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laksamana Sukardi dari PDIP. Perombakan kabinet pun terjadi kembali, kali ini empat menteri diberhentikan oleh presiden KH. Abdurrahman Wahid, yaitu Menteri Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono; Jaksa Agung, Marzuki Darusalam; Menteri Eksplorasi Laut, Sarwono Kusumaatmadja; Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional, Cucuk Sudarijanto.[25]

Selain yang telah disebutkan di atas, kontroversi lain atas kebijakan presiden KH. Abdurrahman Wahid adalah dengan mengusulkan pencabutan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang berisi tentang Marxisme-Leninisme.[26] Usulan tersebut mendapatkan reaksi yang keras dari sebagian masyarakat, yang mana mereka beranggapan bahwa kaum komunis pernah melakukan pemberontakan di Indonesia. Kontroversi lainnya, presiden KH. Abdurrahman Wahid juga mengusulkan untuk membuka hubungan perdagangan dengan Israel, yang mana hal tesebut menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Terkait dengan itu, isu lain pun muncul yang mana presiden KH. Abdurrahman Wahid dikaitkan dengan keanggotaannya pada Simon Peres Foundation.[27]

Hal lainnya, timbulnya hubungan buruk antara presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan TNI, karena adanya usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik. Hubungan tersebut bermula dari Pangkostrad, Letjen TNI Agus Wirahadikusumah yang

[25]Gunawan, *Hari-Hari Terakhir*, 268.
[26]Wicaksana, *Gus Dur Jejak Bijak*, 54.
[27]Ibid., 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka skandal korupsi yang melibatkan Yayasan Dharma Putra milik Kostrad.[28] Namun, agar skandal tersebut tidak mempermalukan institusi TNI banyak dari anggota TNI, terutama mantan Panglima TNI sebelumnya untuk tidak mengusut tuntas kasus tesebut. Tidak halnya dengan Pangkostrad Agus Wirahadikusumah yang ingin terus mengusut kasus tersebut. Akibat terlampau jauhnya langkah Pangkostrad Agus Wirahadikusumah dalam bertindak, maka penanganan kasus tesebut pun harus dengan menyingkirkan Agus Wirahadikusumah.[29] Melalui Megawati Soekarnoputri selaku wakil presiden, anggota TNI menekan presiden KH. Abdurrahman Wahid agar mencopot jabatan Agus Wirahadikusumah dari Pangkostrad. Meski telah dicopotnya Agus Wirahadikusumah dari Pangkostrad, tetapi presiden KH. Abdurrahman Wahid berencana untuk menunjuk Agus Wirahadikusumah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, hal tersebut diurungkan oleh pesiden KH. Abdurrahman Wahid karena mendapatkan tekanan dari petinggi TNI yang mengancam untuk pensiun. Semakin buruknya hubungan presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan TNI terihat ketika adanya konflik antara kaum Muslim dengan kaum Kristen di Maluku. Pada saat konflik tersebut, presiden KH. Abdurrahman Wahid meminta TNI untuk menghentikan aksi Laskar Jihad.Namun bukannya menghentikan, TNI malah mempersenjatai mereka dengan senjata TNI.

Maraknya kebijakan-kebijakan yang dilakukan presiden KH. Abdurrahman Wahid bernilai kontroversial, menyebabkan kedudukan KH.

[28]Gunawan, *Hari-Hari Terakhir*, 242.
[29]Ibid., 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Wahid sebagai presiden terancam. Hal tersebut, dikarenakan banyaknya pihak yang awalnya mendukung presiden KH. Abdurrahman Wahid berubah menjadi musuh politik presiden, terutama mayoritas anggota parlemen yang mulai tidak menginginkan lagi KH. Abdurrahman Wahid sebagai pesiden.

Di tengah keadaan politik yang tidak kondusif tersebut, presiden KH. Abdurrahman Wahid kembali terlibat dalam kasus yang membuat posisinya sebagai pesiden semakin terpojokan. Kasus tersebut adalah kasus pencairan dan penggunaan danaYayasan Kesejahteraan Karyawan (Yanetera) Bulog senilai 35 milyar, serta kasus dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS.[30] Akibat persoalan *Buloggate* dan *Bruneigate* yang menyeret presiden KH. Abdurrahman Wahid, DPR pun mengusulkan untuk menggunakan hak angket[31] hingga akhirnya persoalan tersebut berujung pada memorandum DPR terhadap presiden KH. Abdurrahman Wahid yang menyebutkan adanya pelangaran terhadap haluan negara.

Tidak sampai di situ, ketika Memorandum II DPR, presiden KH. Abdurrahman Wahid dianggap mengeluarkan kebijakan yang mendatangkan kontroversial di mana Presiden KH. Abdurrahman Wahid dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Memberhentikan Jenderal Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri dengan digantikan oleh Chaerusin Ismail.

[30]Wicaksana, *Gus Dur Jejak Bijak*, 54.
[31]Hak angket adalah hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengadakan penyelidikan atas ketidakberesan di dalam lembaga pemerintah. Kamus Besar Bahasa Indonesia V.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengeluarkan Maklumat Presiden (Dekrit Presiden)
3. Membekukan MPR RI dan membubarkan partai Golkar

Karena banyaknya kontoversi yang terjadi pada pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid, terutama mengenai pelanggaran haluan negara yang dituduhkan kepada presiden KH. Abdurrahman Wahid, serta telah dianggap melakukan pelanggaran berat tehadap konstitusi, menjadikan alasan kuat MPR untuk melakukan Sidang Istimewa untuk memakzulkan presiden KH. Abdurrahman Wahid.

C. Proses Pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Tahun 2001

Wacana akan pemakzulan terhadap presiden KH. Abdurrahman Wahid bermula dari adanya kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* yang terjadi pada Mei 2000. Persoalan mengenai *Buloggate* dan *Bruneigate* itu pun kemudian mendapatkan respon langsung dari sejumlah 236 anggota DPR dengan mengadakan penyelidikan tehadap kasus tesebut. Untuk menyelidiki keterkaitan presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan *Buloggate*dan *Bruneigate*, DPR pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk pada tanggal 5 September 2000.[32]

Setelah menyelesaikan tugasnya, Pansus pun melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-36 tanggal 1 Februari 2001. Dalam laporannya, Pansus membuat kesimpulan sebagai berikut:[33]

[32]Ibid.,150
[33]Ibid., 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. "Patut diduga bahwa Presiden Abdurrahman Wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog.
2. Adanya inkonsistensi pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darussalam, menunjukkan bahwa presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnyakepada Masyarakat."

Laporan hasil kerja Pansus tersebut diterima dan disetujui oleh anggota DPR dari beberapa fraksi, kecuali dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (FPDKB). Meskipun terdapat dua fraksi yang tidak menyetujui hasil laporan Pansus tersebut, pada akhirnya dengan hasil pemungutan suara 393 menerima dan empat menolak, Rapat Paripurna DPR RI itu pun memutuskan bahwa DPR menyetujui hasil kerja Pansus dan sepakat untuk menyampaikan Memorandum kepada presiden KH.Abdurrahman Wahid.[34] Adapun isi Memorandum tersebut mengingatkan presiden KH.Abdurrahman Wahid, sungguh-sungguh melanggar haluan negara, yaitu:[35]

1. "Melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan Presiden
2. Melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme."

Menanggapi Memorandum tersebut, presiden KH. Abdurrahman Wahid pun menyampaikan tanggapannya pada Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Maret 2001, yang mana tanggapan presiden KH. Abdurrahman Wahid tersebut dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Baharudin Lopa yang berbunyi: "Saya meyakini, dalam kasus ini secara hukum saya tidak bersalah. Tapi, saya menyadari pula bahwa saya mungkin kurang koopertif dalam

[34] Gunawan, *Hari-Hari Terakhir*, 261.
[35]Zoelva, *Pemakzulan Presiden*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersikap karena saya merasa disudutkan sejak awal. Itulah sebabnya, melalui kesempatan ini saya meminta maaf jika ada sikap-sikap yang tidak terpuji atau tidak berkenan di hati," [36]

Melalui tanggapan tersebut, presiden KH. Abdurrahman Wahid menyatakan menolak memorandum DPR tesebut. Penolakan memorandum tersebut karena memorandum tersebut dianggap telah menyalahi ketentuan prosedural maupun materinya. Dalam hal tersebut, presiden KH. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa proses pembentukan dan tata kerja Pansus tidak sesuai prosedural. Hal tersebut, karena terbentuknya Pansus tidak didaftarkan terlebih dahulu pada Berita Negara RI yang mana sesuai dengan ketentuan UU No. 6 tahun 1954.[37] Selain itu, pembuktian hukum atas pelanggaran hukum presiden pun belum ada, sehingga menurut presiden KH. Abdurrahman Wahid memorandum tersebut hanya mengada-ngada dan tidak sesuai dengan asas konstitusional.Akhirnya, presiden KH. Abdurrahman Wahid pun tidak mengindahkan memorandum DPR tersebut. Karena tidak adanya perubahan kebijakan dan perilaku presiden atas memorandum DPR, serta keadaan negara yang tidak menentu akibat terjadinya kerusuhan dan pergolakan di daerah-daerah yang hanya dibiarkan presiden KH. Abdurrahman Wahid, maka pada tanggal 30 April 2001 DPR kembali mengeluarkan Memorandum II untuk presiden KH. Abdurrahman Wahid.[38]

[36]Cahyo, *Salah Apakah*, 226-227.
[37]Fahman. *Kontroversi Sidang*, 3.
[38]Zoelva, *Pemakzulan Presiden*, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memorandum II yang dikeluarkan DPR itu pun tertuang dalam SK DPR No. 47/IV/2000-2001 tertanggal 30 April 2001 yang isinya adalah sebagai berikut:[39]

1. "Selama tiga bulan, terhitung 1 Februari 2001, presiden KH. Abdurrahman Wahid tidak sungguh-sungguh memperhatikan Memorandum I DPR.
2. DPR menyampaikan Memorandum II kepada presiden KH. Abdurrahman Wahid sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor III tahun 1978.
3. DPR memberikan kesempatan satu bulan kepada presiden KH. Abdurrahman Wahid untuk mengindahkan Memorandum II."

Setelah sebulan sejak dikeluarkannya Memorandum II, presiden KH. Abdurrahman Wahid pun tidak mengindahkan Memorandum II tersebut hingga akhirnya para anggota DPR memutuskan untuk meminta MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Sesuai dengan permintaan DPR akhirnya MPR memutuskan menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR pada tanggal 1-7 Agustus 2001 dengan agenda meminta pertanggungjawaban presiden KH. Abdurrahman Wahid.[40]

Tidak sesuai dengan jadwal awal yang telah ditetapkan, Sidang Istimewa MPR pun harus dipercepat menjadi tanggal 21-26 Juli 2001. Hal yang mendasari dipercepatnya pelaksanaan Sidang Istimewa MPR karena situasi negara yang semakin kacau setelah dilantiknya Jenderal Polisi Chaeruddin Ismail menjadi Pjs. Kapolri yang menggantikan Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro pada tanggal 20 Juli 2001.[41]Pelantikan Jenderal

[39]Gunawan, *Hari-Hari Terakhir*, 266.
[40]Zoelva, *Pemakzulan Presiden*, 157.
[41]Fahman. *Kontroversi Sidang*, 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Polisi Chaeruddin Ismail menjadi Pjs. Kapolri pun semakin memperburuk hubungan presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan DPR maupun MPR, yang mana pelantikan tesebut dianggap telah melanggar TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Pengangkatan Kapolri.[42]

Karena kebijakan presiden KH. Abdurrahman Wahid yang mengangkat Chaeruddin Ismail menjadi Pjs. Kapolri tanpa persetujuan DPR itulah akhirnya mengadakan Rapat Paripurna MPR yang membahas percepatan Sidang Istimewa MPR. Dalam rapat tersebut, dihadiri oleh Fraksi Golkar, Faksi PPP, Fraksi Reformasi, Fraksi PBB, Fraksi KKI, Fraksi Partai Daulatul Ummah, Faksi TNI/Polri, Utusan Golongan, dan Non-Fraksi.[43]Namun, dua fraksi lain yaitu Fraksi PKB dan Faksi PDKB yang menolak untuk hadir dalam rapat tersebut karena menurut mereka rapat tersebut merupakan kegiatan inkonstitusional. Dari 686 anggota MPR, yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut sebanyak 602 anggota, dengan hasil suara yang menyetujui Sidang Istimewa MPR digelar mulai tanggal 21 Juli 2001 sebanyak 592 orang, 5 orang yang menolak, dan 5 orang yang abstain.[44] Selain itu, rapat tersebut juga memutuskan bahwa pada tanggal 23 Juli 2001 untuk mengundang presiden KH. Abdurrahman Wahid untuk hadir dalam Sidang Istimewa MPR dengan agenda mendengarkan pertanggungjawaban dari presiden.

Dalam menanggapi dipecepatnya Sidang Istimewa MPR tersebut, pada tanggal 22 Juli 2001 pada pukul 19.05 WIB, presiden KH.

[42]Ibid., 21
[43]Ibid., 19
[44]Ibid., 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Wahid mengeluarkan pernyataan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:[45]

1. "Presiden menegaskan tak akan mundur
2. Presiden memerintahkan Fraksi TNI/Polri menarik dukungan atas percepatan Sidang Istimewa MPR.
3. Presiden akan mengeluarkan keputusan penting pukul 22.00 WIB (mulanya 18.00 WIB)."

Hal tersebut kemudian disusul dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 01.10 WIB yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden. Isi dari Dekrit Presiden tersebut diantaranya:[46]

1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggaakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun.
3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 itu langsung direspon Amien Rais selaku MPR RI dengan konferensi pers yang diadakan pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 02.45 WIB. Dalam konferensi pers tersebut menegaskan bahwa MPR menyatakan menolak Dekrit Presiden dan meminta masyarakat untuk bekerja seperti biasa.[47] Kemudian, pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 09.00 WIB Sidang Istimewa MPR mulai digelar. Sebelum membahas agenda utama dalam Sidang Istimewa MPR terkait pertanggungjawaban presiden KH. Abdurrahman

[45]Gunawan, *Hari-Hari Terakhir*, 272.
[46]Wicaksana, *Gus Dur Jejak Bijak*, 70-71
[47]Ibid., 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid, para anggota MPR secara resmi menyatakan untuk menolak Dekrit Presiden. Keputusan tersebut disetujui oleh 599 anggota dari 601 anggota MPR dan 2 anggota abstain.[48] Selain itu, MPR juga memutuskan bahwa Dekrit Presiden yang dikeluarkan presiden KH. Abdurrahman Wahid telah melanggar haluan negara.

Dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, presiden KH. Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan undangan untuk menghadiri Sidang Istimewa MPR tersebut. Akibat tidak hadirnya presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa tersebut, presiden telah dianggap melakukan pelanggaran tehadap konstitusi, karena presiden menolak memberikan pertanggungjawaban di hadapan MPR. Akibat adanya Dekrit Presiden dan penolakan presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam memberikan pertanggungjawaban di Sidang Istimewa MPR, menjadikan alasan utama sejumlah fraksi-fraksi yang hadir dalam Sidang Istimewa MPR untuk memakzulkan presiden KH. Abdurrahman Wahid.

Setelah melakukan musyawarah dengan hasil suara bulat dalam Sidang Istimewa MPR, pada akhirnya Sidang Istimewa MPR tersebut menghasilkan beberapa ketetapan penting kenegaraan, diantaranya:[49]

1. TAP MPR Nomor II/MPR/2001 yang isinya mengenai ketidakhadiran presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa, dekrit yang dianggap majelis sebagai pelanggaan haluan negara,

[48]Zoelva, *Pemakzulan Presiden*, 160.
[49]Fahman. *Kontroversi Sidang*, 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden, dan tentang pencabutan dan pernyataan majelis bahwa TAP MPR Nomo VII/MPR/1999 yang menyangkut pengangkatan KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden sudah tidak berlaku lagi.

2. TAP MPR Nomor III/MPR/2001 yang isinya tentang penetapan Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya sebagai wakil presiden menjadi presiden menggantikan presiden.

Dengan dihasilkannya ketetapan MPR tersebut, maka kedudukan KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden secara resmi telah dimakzulkan pada tanggal 23 Juli 2001. Dengan dimakzulkannya KH. Abdurrahman Wahid sebelum berakhirnya masa jabatannya tersebut, maka masa kepresidenan KH. Abdurrahman Wahid dalam memimpin Indonesia hanya berlangsung selama 21 bulan, yaitu sejak 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001.[50]

[50]Wicaksana, *Gus Dur Jejak Bijak*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

UPAYA DUTA MASYARAKAT DALAM MENOLAK PEMAKZULAN PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID TAHUN 2001

Media memiliki peranan dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat akan suatu isu maupun pemberitaan. Dalam hal tersebut, pro dan kontra akan suatu pemberitaan pun mewarnai cara pandang masyarakat dalam menanggapi suatu berita tersebut. Selain itu, media yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi masyarakat dapat menjadikan media sebagai alat propaganda, terutama pemberitaan yang berkaitan dengan dunia politik. Tidak dapat dipungkiri, pada masa menjelang terjadinya pemakzulan terhadap presiden KH. Abdurrahman Wahid pada Juli 2001, beberapa media menjadi alat propaganda dalam memakzulan pesiden KH Abdurrahman Wahid. Hal tersebut telihat dari banyaknya pemberitaan yang ditampilkan oleh media tersebut telah menyudutkan presiden KH. Abdurrahman Wahid dan pemberitaan tersebut juga menampilkan dukungan untuk terjadinya pemakzulan terhadap presiden KH. Abdurrahman Wahid.

Namun, tidak demikian dengan surat kabar Duta Masyarakat, yang berani tampil untuk menolak pemakzulan terhadap presiden KH. Abdurrahman Wahid.[1] Dalam menolak pemakzulan terhadap presiden KH. Abdurrahman Wahid, surat kabar Duta Masyarakat berusaha untuk menyebarkan dan menampilkan pemberitaan-pemberitaan yang memihak kepada presiden KH. Abdurrahman Wahid. Dalam hal tersebut, pemberitaan yang ditampilkan oleh surat kabar Duta

[1]Redaksi, "Tentang Kami Korannya Gus Dur" dalam https://Duta.co/tentang-kami/ (10 September 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat menampilkan berita yang diperoleh dari eksplorasi para pakar hukum tata negara bahwa pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid berlawanan dengan konstitusi. Adapun pemberitaan yang ditampilkan oleh surat kabar Duta Masyarakat dalam upaya menolak pemakzulan terhadap presiden KH. Abdurrahman Wahid dapat terlihat dalam beberapa pemberitaan yang terbit pada bulan Mei, Juni, Juli 2001, yang tersaji sebagai berikut.

A. Pemberitaan Edisi Mei 2001

Pada berita yang diterbitkan surat kabar Duta Masyarakat pada Pada tanggal 15 Mei 2001 dengan judul *Gus Dur Saya Tidak Akan Mundur*[2] memiliki dua unsur tema yaitu tentang tanggapan Gus Dur dalam menyikapi isu atau fitnah yang menimpanya, serta tentang mengenai perjalanan Gus Dur dalam menghadiri acara dialog masyarakat di Klaten. Dalam berita tersebut ditunjukkan bahwa dalam menanggapi permasalahan yang menyudutkan Gus Dur sebagai presiden RI, Gus Dur menyatakan tidak akan mundur dari posisinya, yang mana dengan kemunduran presiden akan membawa hancurnya bangsa. Selain itu, berita tersebut menjelaskan perjalanan Gus Dur di Klaten sebagai pendukung dalam menampilkan topik yang diangkat. Judul berita *Gus Dur, Saya Tidak Akan Mundur* menerangkan bahwa Gus Dur tidak akan berhenti menjadi presiden RI, meski banyak pihak yang menyudutkan Gus Dur dalam menghentikan kepemimpinannya sebagai presiden RI. Hal yang sama, ditunjukkan lead berita yang menerangkan bahwa presiden Abdurrahman Wahid mengatakan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai

[2] Redaksi, "Dur Saya Tidak Akan Mundur", Duta Masyarakat (15 Mei 2001). Berita ada di lampiran 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden RI, sebab dengan berhentinya presiden, negara akan hancur lebur. Pada judul dan lead yang ditampilkan menunjukkan adanya respon presiden dalam menghadapi persoalan yang ingin menjatuhkannya dan presiden akan tetap bertahan pada posisinya meski banyak pihak yang ingin menyudutkan Gus Dur.

Berita yang berjudul *Gus Dur, Saya Tidak Akan Mundur* secara umum menerangkan sikap presiden yang tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dengan segala persoalan yang menimpanya. Kemudian, Gus Dur juga menanggapi perseteruan yang terjadi antar elit politik yang juga melibatkan dirinya. Dalam menanggapi hal tersebut, Gus Dur memiliki pandangannya sendiri, yang mana Gus Dur membiarkan hal tersebut sebagai bentuk pendapat maupun pandangan yang tidak sejalan. Selain menjelaskan tentang tanggapan presiden Abdurrahman Wahid, berita ini juga menerangkan perjalanan Gus Dur di Klaten. Pada penutup berita disampaikan bahwa Gus Dur membuka seluas-luasnya kepada siapapun untuk dapat berinteraksi serta memberikan usulan kepada Gus Dur terkait kepemimpinannya.

Elemen grafis, yang ditekankan pada berita adalah Gus Dur memberikan kebebasan untuk berpendapat. Selain itu, dalam berita tersebut ditampilkan gambar Gus Dur saat menjawab pertanyaan wartawan yang didampingi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1

Elemen metafora dalam berita tidak ditampilkan sedangkan ekspresi yang ditunjukkan adalah sikap santai presiden dalam menghadapi isu atau fitnah yang menyudutkan posisi Gus Dur. Berdasarkan analisis terhadap berita berjudul *Gus Dur, Saya Tidak Akan Mundur* menggambarkan bahwa secara eksplisit wartawan sebagai penulis berita menempatkan Gus Dur sebagai subjek pemberitaan, sehingga secara garis besar berita tersebut menjelaskan hal yang berkaitan dengan Gus Dur dan berita tersebut memiliki ideologi yang memihak terhadap Gus Dur.

Kemudian, dengan judul *651 Kiai Jateng Tidak Rela Gus Dur Dijatuhkan*[3] yang terbit pada tanggal 22 Mei 2001, terdapat dua unsur tema, yaitu penolakan para kyai se Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta jika Gus Dur diturunkan di tengah jalan dan pengawalan para ulama Nahdalatul Ulama terhadap akibat perkembangan situasi bangsa dalam penurunan presiden Abdurrahman Wahid. Dalam hal ini, para ulama Nahdalatul Ulama yang mengawal kondisi yang diakibatkan penurunan Abdurrahman Wahid merupakan sebagai pendukung dari unsur penolakan para kyai tersebut. Pada judul berita tersebut menjelaskan bahwa para kyai se-Jawa tengah yang

[3] Redaksi, "651 Kiai Jateng Tidak Rela Gus Dur Dijatuhkan", Duta Masyarakat (22 Mei 2001). Berita ada di lampiran 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjumlah sebanyak 651 menyatakan ketidakrelaannya apabila Abdurrahman Wahid dijatuhkan dari jabatannya. Hal tersebut juga mengartikan bahwa para kyai tersebut berupaya untuk membela Abdurrahman Wahid agar posisinya tidak dijatuhkan. Hal tersebut pun diperjelas pada bagian lead yang menunjukkan sikap 651 kyai se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyatakan ketidakrelaan jika presiden Abdurrahman Wahid diturunkan dari jabatannya sebelum tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa berita berjudul *651 Kiai Jateng Tidak Rela Gus Dur Dijatuhkan* terdapat unsur ideologi yang mengindikasikan bahwa wartawan berita yang memberitakan berita tersebut memiliki keberpihakan kepada Abdurahman Wahid, hal tersebut telah terlihat pada bagian judul berita maupun lead berita yang dijelaskan secara eksplisit.

Dalam berita berjudul *651 Kiai Jateng Tidak Rela Gus Dur Dijatuhkan* secara garis besar menceritakan penolakan para kyai se Jawa Tengah apabila presiden Abdurrahman Wahid diturunkan sebelum masanya, yakni tahun 2004. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap para kyai yang tidak rela apabila penurunan presiden Abdurrahman wahid sebelum tahun 2004 itu terjadi. Selain itu, berita berjudul *651 Kiai Jateng Tidak Rela Gus Dur Dijatuhkan*jugamenjelaskan dampak yang diakibatkan percepatan penurunan presiden Abdurrahman Wahid sebelum masa berakhirnya, yang mana dalam berita tersebut dijelaskan bahwa percepatan penurunan Abdurrahman Wahid adalah merusak sendi-sendi yang ada pada negara, sehingga keamanan negara terganggu, dan perekonomian rakyat menjadi kacau, serta rakyat menjadi yang dirugikan. Dalam bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penutup berita yang disampaikan adalah penjelasan dari para kyai dalam memihak Gus Dur. Dalam memihak Gus Dur, Muzadi ketua umum PBNU dalam berita tersebut menyampaikan bahwa para kyai akan membantu Gus Dur yang selama ini tidak memiliki kesalahan tetapi telah disudutkan oleh lawan politiknya. selain itu, lawan politik hanya mencari-cari kesalahan Abdurrahman Wahid agar dapat dijatuhkan.

Pada struktur retoris, elemen grafis berita tersebut menekankan bahwa dalam upaya menurunkan Abdurrahman Wahid, para lawan politik mencari-cari kesalahan Abdurrahman Wahid agar Abdurrahman Wahid menjadi tersudutkan dengan kesalahan tersebut. Elemen metafora dalam berita tersebut menunjukkan kata "setali tiga uang" yang terdapat pada kutipan berita berikut.

> "Endapan berbagai masalah bangsa dan negara yang selama ini terjadi amat sulit dibongkar dengan penggantian presiden, katanya. Misalnya masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sudah terbentuk selama 32 tahun orba, kerusakan moral bangsa. Setali tiga uang', katanya.

Kata "setali tiga uang" tersebut mengartikan bahwa tidak ada bedanya atau sama saja, yang mana dalam kutipan berita tersebut menjelaskan bahwa dengan penggantian presiden akan membawa masalah yang tidak berbeda dengan permasalahan KKN yang terjadi pada masa orba dan masalah kerusakan moral bangsa. Pada elemen ekspresi, ditunjukkan sikap para kyai yang tidak rela terhadap penurunan presiden.

Disamping itu, surat kabar Duta Masyarakat juga menyampaikan bahwa banyak dari lawan politik Gus Dur yang selalu menyudutkannya dengan mencari-cari kesalahan Gus Dur agar Gus Dur tejatuh. Oleh karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, pada tanggal 29 Mei 2001 surat kabar Duta Masyarakat menerbitkan berita berjudul *Kejagung Soal Kasus Bulog-Brunei "Presiden Tidak Terlibat"*[4],terlihat bahwa struktur tematik yang ditonjolkan dalam berita tersebut adalah mengenai hasil penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus *Bruneigate* dan *Buloggate.* Pada berita tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus kasus penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera Badan Urusan Logistik sebesar 35 Milyar dan dana bantuan Sultan Brunei sebesar dua juta dolar, presiden Abdurrahman Wahid tidak terlibat, yang mana hal tersebut telah digambarkan secara jelas oleh wartawan berita pada judul berita tersebut. Selain itu pada bagian *lead* berita menjelaskan bahwa hasil penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kalau tidak ada indikasi presiden Abdurrahman Wahid terlibat dalam kasus *Bruneigate* dan *Buloggate*. Dari judul maupun lead berita tersebut telah menunjukkan bahwa wartawan yang menulis berita tersebut secara implisit menggambarkan sudut pandang yang memihak presiden Abdurrahman Wahid, yang mana presiden Abdurrahman Wahid merupakan objek dalam pemberitaan.

Selain itu, secara umum berita yang berjudul *Kejagung Soal Kasus Bulog-Brunei "Presiden Tidak Terlibat"* memiliki jalan cerita yang menjelaskan bahwa tersangka dari kasus penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera Badan Urusan Logistik sebesar 35 Milyar dan dana bantuan Sultan Brunei sebesar dua juta dolar bukanlah presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian, hal tersebut diperjelas dari informasi berita yang menjelaskan hasil

[4] Redaksi, "Kejagung Soal Kasus Bulog-Brunei "Presiden Tidak Terlibat", Duta Masyarakat, (9 Mei 2001). Berita ada di lampiran 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelidikan Kejagung mengatakan bahwa tidak ada alat bukti serta konfirmasi dan *cross check* kepada 34 saksi, tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa presiden Abdurrahman Wahid menggunakan dana Yanatera Bulog untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tersangka dari kasus penyelewangan dana Yanatera Bulog adalah pejabat Bulog dan Yanatera, yakni Mulyono Makmur dan Yakob Ishkak, serta Suwondo dan Sapuan. Kemudian, penutup dari berita ini adalah tentang penjelasan Kejagung mengenai kasus Bruneigate yang dinyatakan ditutup, sedangkan kasus Buloggate ditindak lanjuti dengan tersangka pejabat dari Bulog dan Yanatera. Pada struktur retoris, pada elemen grafis berita tersebut menekankan bahwa penyelidikan Kejaksaan Agung terkait kasus *Bruneigate* dan *Buloggate* dilakukan sesuai prosedur sehingga hasil penyelidikan tersebut memiliki simpulan yang yuridis bukan politis.

B. Pemberitaan Edisi Juni 2001

Dalam pemberitaan yang diterbitkan pada Juni 2001, surat kabar Duta Masyarakat berusaha menyampaikan kepada pembacanya bahwa pelaksanaan Sidang Istimewa MPR telah mendapatkan banyak penolakan dai berbagai pihak. Hal tersebut terlihat pada berita yang terbit pada tanggal 6 Juni 2001 berjudul *FKB Harus Menggugat,*[5] menampilkan struktur tematik tentang penyampaian saran dari anggota MPR Utusan Daerah Jawa Timur kepada FKB dalam merespon keputusan DPR terkait sidang istimewa.Selain itu, dalam unsur tema tesebut menjelaskan sudut pandang dari anggota MPR

[5] Redaksi, "FKB Harus Menggugat", Duta Masyarakat (6 Juni 2001). Berita ada di lampiran 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utusan Daerah Jawa Timur, Dr. M. Ali, SH, Dip. Ed, MSc terkait sikap yang harus dilakukan FKB terhadap keputusan DPR dalam melaksanakan sidang istimewa. Kemudian, judul berita yang ditampilkantersebut memiliki unsur untuk menganjurkan kepada FKB agar FKB melakukan gugatan terhadap DPR. Selain itu, pada bagian lead berita yang disampaikan adalah keputusan DPR mengeluarkan Memorandum I seharusnya dinyatakan batal dalam hukum, karena alasan dikeluarkannya Memorandum I tersebut akibat dari adanya dugaan keterlibatan presiden pada kasus Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunei padahal dalam kasus tesebut telah dibuktikan dari hasil penyidikan Kejaksaaan yang menyatakan bahwa presiden tidak terlibat dalam kedua kasus tersebut. Dalam lead beita tersebut menunjukkan adanya ketidaksetujuan akan dikeluarkannya Memorandum I kepada presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam berita berjudul *FKB Harus Menggugat*, secara umum menjelaskan bahwa dalam keputusan Sidang Paripurna untuk meminta Sidang Istimewa tedapat indikasi cacat yuridis. Dalam hal tersebut, dijelaskan bahwa pada anggota DPR terdapat 3 anggota DPR yang tidah sah, yakni anggota yang telah menjabat sebagai menteri. Kemudian, dalam menyikapi indikasi cacat hukum dalam penyetujuan Sidang Istimewa, Dr. M. Ali, SH, Dip. Ed, MSc memberikan anjuran kepada FKB agar melakukan perlawanan hukum terhadap putusan Sidang Paripurna yang disinyalir tidak sah. Telah diketahui bahwa dalam Sidang Paripurna tersebut FKB melakukan *walkout.* Selain itu, keputusan DPR dalam meminta Sidang Istimewa telah menjadi bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlawanan hukum dan termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, yakni anggota DPR.

Struktur retoris yang terdapat pada berita *FKB Harus Menggugat* adalah elemen grafis yang menekankan bahwa dalam keputusan DPR pada sidang paripurna dalam meminta Sidang Istimewa terdapat ketidaksahan karena terdapat 3 anggota DPR yang tidah sah, yakni anggota tersebut telah menjadi menteri. Dalam hal tersebut, diperkuat dengan adanya pasal 41 ayat (2) dan (3) yang diatur sebagaimana dalam UU No. 4 tahun 1999 pasal 14 ayat (1) tentang larangan perangkapan jabatan. Elemen metafora terdapat pada kalimat *"langkah DPR telah keluar dari koridor hukum"*. Dalam kata koridor hukum memiliki maksud berada pada haluan hukum, sehingga kalimat *"langkah DPR telah keluar dari koridor hukum"* menjelaskan bahwa dalam mengambil langkah DPR telah berada di luar haluan hukum yang ada. Unsur ekspresi pada berita ini tidak ditunjukkan dengan jelas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam berita berjudul *FKB Harus Menggugat*, berita tersebut menampilkan pandangan dari narasumber berita tentang keputusan DPR dalam meminta Sidang Istimewa. Selain itu, berita tersebut secara ekspilisit mengarahkan keberpihakan kepada pihak FKB dengan menganjurkan FKB untuk melawan DPR secara hukum. Dengan adanya keberpihakan kepada FKB, secara tersembunyi pemberitaan tersebut juga mengarah kepada keberpihakan kepada Abdurrahman Wahid, yang mana FKB merupakan fraksi yang menyusung Abdurahman Wahid sebagai presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, surat kabar Duta Masyarakat menyampaikan bahwa pelaksanaan Sidang Istimewa tersebut telah betentangan dengan UUD dan bersifat illegal. Hal tersebut terlihat pada pemberitaan suat kabar Duta masyarakat pada tanggal 13 Juni 2001, yang berjudul *Kawan-Kawan Siap Bela Gus Dur*[6], unsur tema yang ditampilkan dalam berita adalah bahwa Sidang Istimewa MPR tidak memiliki landasan konstitusional dalam pelaksanaannya. Hal tersebut ditunjukkan dalam berita yang menjelaskan poin-poin yang membuat pelaksanakan Sidang Istimewa tidak sesuai dengan konstitusi sehingga dianggap illegal. Pada judul berita tersebut menunjukkan penekanan yang tegas dalam kesiapan para pendukung Gus Dur dalam membelanya jika presiden diturunkan dari kedudukannya sebagai presiden RI. Selain itu, judul tersebut juga mengandung seruan, yang mana judul tersebut menggambarkan ungkapan perasaan untuk mendukung Gus Dur.Dari sudut pandang penulis berita, judul tersebut berusaha untuk mengajak pembaca agar ikut serta dalam membela Gus Dur. Kemudian, pada lead berita menerangkan pernyataan Hendardi seorang pakar hukum bahwa Sidang Istimewa MPR sudah kehilangan pijakan konstitusi. Selain itu, pada lead tersebut juga mengungkapkan perasaan Hendardi dan pakar hukum lainnya serta para aktifis untuk bersedia membela Gus Dur jika Gus Dur dilengserkan secara sepihak oleh MPR.

Secara garis besar, berita berjudul *Kawan-Kawan Siap Bela Gus Dur* menjelaskan kesediaan Hendardi seorang pakar hukum dan rekan

[6] Redaksi, "Kawan-Kawan Siap Bela Gus Dur", Duta Masyarakat (13 Juni 2001). Berita ada di lampiran 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seprofesinya, serta para aktifis dalam memihak Gus Dur pada Sidang Istimewa MPR jika dalam sidang tersebut Gus Dur dijatuhkan hanya berdasarkan satu pihak saja, yakni dari MPR. Dalam berita tersebut, juga menyampaikan bahwa alasan yang mendasari Sidang Istimewa sudah kehilangan pijakan konstitusi karena sudah terbukti jika presiden Abdurrahman Wahid tidak memiliki keterlibatan dari permasalahan sumbangan Sultan Brunei dan Yanatera Bulog, yang mana pada awalnya Sidang Istimewa dilaksanakan akibat dugaan keterlibatan presiden dalam sumbangan Sultan Brunei dan masalah Yanatera Bulog. Selain itu, pada bagian penutup menjelaskan keyakinan para pakar hukum dan aktifis prodem dalam membela Gus Dur yang mana alasan adanya Sidang Istimewa sangat naif. Dalam hal tersebut, berita *Kawan-Kawan Siap Bela Gus Dur* memiliki gambaran dalam menentang pelaksanaan Sidang Istimewa.

Secara struktur retorik, berita dengan judul *Kawan-Kawan Siap Bela Gus Dur* memiliki penekanan pada kata siap. Kata tersebut menunjukkan sikap yang bersedia untuk melakukan sesuatu. Dalam berita tersebut, menunjukkan bahwa sikap bersedia untuk membela Gus Dur. Selain itu, pada elemen metafora terdapat kalimat "*nahdliyin* jangan kecil hati". Yang termuat pada kutipan berita berikut.

> "Saya dan kawan-kawan, siap membela Presiden Gus Dur jika ia dilengserkan dari jabatannya saat SI nanti. Dan masih pihak lain yang siap membela, ini demi hukum. Karena itu, *nahdliyin* jangan kecil hati. Sepanjang itu bertentangan dengan konstitusi Anda tidak sendirian, ujarnya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kutipan tersebut, kata *kecil hati* memiliki arti takut, hilang keberanian, sedangkan *nahdliyin* berarti warga Nahdlatul Ulama. Sehingga kutipan berita tersebut menjelaskan bahwa Hendardi dan pihak lainnya bersedia membela Gus Dur jika pada Sidang Istimewa Gus Dur dilengserkan. Kesediaannya tersebut dilatarbelakangi untuk melindungi hukum yang ada. Selain itu, kutipan tersebut juga menyarankan kepada Nahdlatul Ulama agar tidak kehilangan keberanian dalam membela Gus Dur, karena masih ada pihak yang mendukung Gus Dur jika hal tersebut tidak melawan konstitusi.

Tidak sampai disitu, penolakan surat kabar Duta Masyarakat terhadap Sidang Istimewa MPR juga diperkuat dengan berita yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2001 dengan judul *Prodem Jatim Sepakat Tolak SI* [7]mengandung tema yang menjelaskan penolakan akan penyelenggaraan Sidang Istimewa yang dilakukan oleh para aktifis Jawa Timur yang tergabung dalam gerakan pro demokrasi (prodem). Dalam unsur tema tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa penulis berita ingin mengungkapkan sikap prodem dalam menolak Sidang Istimewa. Hal tersebut diperkuat pada judul berita yang menunjukkan bahwa para aktifis prodem yang ada di Jawa Timur memiliki satu tujuan yang sama dalam menentang adanya Sidang Istimewa. Judul tersebut mengedepankan aksi penolakan tehadap Sidang Istimewa, yang mana aksi penolakan tesebut pada berita.menjadi titik berat yang ingin disampaikan oleh penulis berita. Sejalan dengan hal tersebut, pada bagian lead berita menjelaskan tentang deklarasi berdirinya Aliansi Demokrasi untuk

[7] Redaksi, "Prodem Jatim Sepakat Tolak SI", Duta Masyarakat (18 Juni 2001). Berita ada di lampiran 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reformasi (ADR) yang merupakan berasal dari para aktifis gerakan pro demokrasi. Dalam pendeklarasiannya tersebut, ADR menyatakan berbagai tuntutan, diantaranya adalah menuntut pembubaran Golkar, pembersihan parlemen dan lembaga negara dari unsur orde baru, serta menolak pelaksanaan Sidang Istimewa 2001. Dalam lead berita tersebut, menggambarkan bahwa aksi tuntutan yang disampaikan oleh ADR merupakan bentuk dukungan terhadap presiden KH Abdurrahman Wahid yang dijabarkan secara implisit.

Kemudian, secara umum berita berjudul *Prodem Jatim Sepakat Tolak SI* menyampaikan bahwa terdapat gerakan untuk melawan antek-antek orde baru, yang mana hal tersebut dimulai dengan kembalinya gerakan-gerakan rakyat yang anti orde baru. Dalam hal tersebut, para aktifis prodem menyoroti sikap ketidakpedulian para elit politik yang merupakan antek-antek dari orde baru terhadap aspirasi dan nasib rakyat. Kemudian, dalam penutup berita yang disampaikan adalah orasi-orasi dari para aktifis prodem dalam menentang pelaksanaan SI MPR, serta anjuran yang ditunjukkan kepada presiden agar melakukan pembubaran terhadap Golkar dan membekukan DPR/MPR.

Selain itu, dalam struktur retoris hal yang ditekankan dalam berita tersebut adalah penyampaian orasi para aktifis prodem dalam menentang adanya penyelenggaraan Sidang Istimewa. Melalui orasi yang disampaikan tersebut terlihat bagaimana sikap para aktifis dalam upaya melakukan penolakan terhadap suatu kebijakan yang dapat memperburuk kondisi negara. Dalam hal tersebut, juga dipelihatkan gambar yang menunjukkan tekad ADR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menyuarakan penolakan terhadap Sidang Istimewa ketika beada di Balai Pemuda Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

Gambar 4.2

Unsur metafora pada berita berjudul *Prodem Jatim Sepakat Tolak SI* tidak diperlihatkan, sedangkan unsur ekspresi yang ditampilkan adalah bentuk protes serta kekecewaan para aktifis prodem terhadap penyelenggaraan sidang istimewa. Hal tersebut ditunjukkan dari setiap orasi yang disampaikan oleh perwakilan aktifis yang menyatakan menentang pelaksanaan Sidang Istimewa. Selain itu, bentuk kekecewaan diperlihatkan kepada penguasa parlemen yang merupakan antek-antek orde baru.

C. Pemberitaan Edisi Juli 2001

Pada 7 Juli 2001, surat kabar Duta Masyarakat menerbitkan berita berjudul *Posisi Gus Dur Belum di Ujung Tanduk*[8]. Berita ini memiliki dua unsur tema, yaitu pertama bahwa Gus Dur masih memiliki harapan dalam mempertahankan posisinya sebagai presiden RI. Kedua, upaya Gus Dur untuk melakukan pertemuan dengan para petinggi partai politik. Dalam hal tersebut, unsur kedua menunjukkan usaha yang dilakukan Gus Dur dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai presiden. Hal tersebut menunjukkan

[8] Redaksi, : Posisi Gus Dur Belum di Ujung Tanduk", Duta Masyarakat (7 Juli 2001). Berita ada di lampiran 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa unsur kedua dari tema berita tersebut sebagai penjelas dari unsur utama.

Judul berita yang digunakan penulis berita memiliki pandangan bahwa adanya peluang bagi Gus Dur untuk tidak diturunkan dari jabatannya sebagai presiden. Dalam hal itu, judul tersebut memberitahukan kepada pembaca berita bahwa posisi Gus Dur sebagai presiden masih aman. Kemudian, pada lead menjelaskan bahwa presiden Abdurrahman Wahid berupaya mempertahankan posisinya sebagai presiden dengan melakukan permbicaraan kepada para tokoh politik pimpinan parpol. Dalam hal ini, Gus Dur berupaya mengundang pimpinan partai politik dalam petemuan yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2001 di Istana Bogor untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Dalam berita ini surat kabar Duta Masyarakat memberikan penekanan pada pesan yang disampaikan, yakni bahwa ada niatan baik dari Gus Dur untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada elit partai dengan diadakan petemuan yang dihadiri oleh pimpinan partai.

Struktur retoris pada berita tersebut, ditampilkan gambar yang menunjukkan Gus Dur dengan pimpinan-pimpinan partai yaitu Megawati Soekarno Putri dan Amien Rais. Berikut gambar yang ditampilkan pada berita tersebut:

Gambar 4.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada berita lainnya tanggal 10 Juli 2001, yakni berjudul *Tolak SI, Semua Membebek FPDIP*,[9] stuktur tema yang ditampilkan dalam berita tersebut adalah adanya pandangan yang menolak percepatan Sidang Istimewa yang dilakukan oleh Fraksi PDIP dan diikuti beberapa fraksi lainnya yang disampaikan pada sidang paripurna BP MPR. Dalam tema tersebut, menunjukkan bahwa penulis berita ingin menggambarkan tentang FPDIP yang menjadi pelopor dalam menolak percepatan pelaksanaan Sidang Istimewa. Kemudian, judul berita yang ditampilkan menjelaskan bahwa dalam menolak percepatan sidang istimewa, fraksi-fraksi lain megikuti pandangan FPDIP yang menyatakan untuk menolak percepatan sidang istimewa. Dalam judul tersebut terlihat bahwa FPDIP memiliki pengaruh yang kuat terhadap fraksi lainnya. Pada lead berita, hal yang disampaikan adalah bahwa dalam pelaksanaan Rapat Paripurna BP MPR yang dilaksanakan di gedung Nusantara V, FPDIP menyatakan menolak percepatan Sidang Istimewa, yang kemudian membuat fraksi lainnya mengikuti pandangan dari FPDIP tersebut. Dalam lead tesebut, menunjukkan bahwa FPDIP memiliki kekuasaan besar dalam politik pada saat tersebut, sehingga fraksi lainnya tidak dapat berpaling dari FPDIP. Berdasarkan judul dan lead yang terdapat pada berita tersebut menggambarkan bahwa pemberitaan yang disajikan tersebut mengarah secara jelas kepada pandangan FPDIP terhadap penolakan sidang istimewa. Dengan adanya penolakan terhadap percepatan Sidang Istimewa, maka hal tersebut

[9] Redaksi, "Tolak SI, Semua Membebek FPDIP", Duta Masyarakat (10Juli 2001). Berita ada di lampiran 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga mengindikasikan bahwa terdapat ideologi yang digambarkan secara implisit oleh penulis berita dalam memihak presiden Abdurrahman Wahid. Hal tersebut, karena agenda Sidang Istimewa diadakan untuk presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam jalan ceritanya, berita berjudul *Tolak SI, Semua Membebek FPDIP*,secara umum dibuka dengan menjelaskan putusan FPDIP dalam menolak percepatan sidang istimewa, yang mana sikap FPDIP yang menolak percepatan Sidang Istimewa tersebut diikuti empat fraksi lainnya, yakni FPG, FUG, FPP, dan Fraksi Reformasi. Selain empat fraksi tersebut, FKB sudah lebih dulu bertahan dengan pendiriannya yang menolak pelaksanaan Sidang Istimewa. Kemudian, pada isi berita menjelaskan pandangan fraksi-fraksi terhadap percepatan terhadap Sidang Istimewa, yang mana setiap perwakilan dari fraksi menyatakan menolak percepatan Sidang Istimewa dengan memberikan alasan-alasannya. Selanjutnya dalam bagian penutup, disampaikan bahwa dalam memutuskan percepatan Sidang Istimewa harus dinyatakan dengan suara anggota DPR. Selain itu, berita tersebut ditutup dengan mempertanyakan sikap pimpinan MPR yang tidak semestinya dalam memutuskan melaksanakan sidang istimewa.

Struktur retoris pada berita tersebut, menunjukkan bahwa unsur grafis dalam berita tersebut adalah bahwa syarat dasar pelaksanaan Sidang Istimewa diatur dalam TAP MPR No. 3 tahun 1978. Selain itu, dalam berita *Tolak SI, Semua Membebek FPDIP* ditampilkan gambar yang menunjukkan pelaksanaan Sidang Paripurna MPR yang dilaksanakan di gedung Nusantara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

V serta dihadiri oleh anggota fraksi yang menjadi anggota parlemen. Berikut ini gambar yang termuat pada berita tersebut:

Gambar 4.4

Sedangkan, untuk unsur metafora pada berita ini tidak dimuat dalam dan ekspresi tidak ditunjukkan.

Di tanggal 23 Juli 2001 surat kabar Duta Masyarakat juga memuat *Pernyataan Presiden*[10] menampilkan unsur tema yang menerangkan pandangan presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam merespon penyelenggaraan Sidang Istimewa untuk memakzulkan presiden. Dalam unsur tema tersebut menggambarkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid sebagai subjek pemberitaan berupaya membela diri dengan menyampaikan pandangannya tehadap permasalahan-masalahan yang menyudutkan dirinya yang kemudian berujung pelaksanaan Sidang Istimewa MPR. Pada judul berita secara eksplisit menjelaskan bahwa berita tersebut adalah pernyataan resmi dari presiden yang mengungkapkan respon presiden terhadap penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR. Lead berita dalam *Pernyataan Presiden* tersebut menjelaskan bahwa presiden Abdurrahman Wahid menyatakan penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR telah melanggar UUD.

[10] Redaksi, "Pernyataan Presiden", Duta Masyarakat, (23 Juli 2001). Berita ada di lampiran 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal tersebut, menunjukkan bahwa presiden KH. Abdurrrahman Wahid memberikan respon menentang terhadap adanya pelaksanaan Sidang Istimewa MPR.

Dalam jalan ceritanya, berita tersebut secara garis besar menyampaikan bahwa presiden KH. Abdurrahman secara tegas menolak pelaksanaan sidang istimewa, yang mana pelaksanaan sidang tersebut telah melanggar UUD. Pada informasi yang disampaikan, berita tersebut menjelaskan pandangan presiden terhadap hal yang melatarbelakangi pelaksanaan Sidang MPR, yang menurutnya terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam terselenggaranya Sidang Istimewa, sehingga pelaksanaan Sidang Istimewa dipandang menjadi sesuatu yang ilegal dan tidak sah. Selain itu, pada isi pernyataan presiden tersebut, presiden KH. Abdurrahman Wahid menyatakan tidak akan menghadiri Sidang Istimewa MPR dengan alasan bahwa Sidang Istimewa MPR tersebut tidak sesuai dengan ketetapan MPR serta UUD 1945. Pada bagian akhir penutup menjelaskan upaya presiden dalam membatalkan pelaksanaan Sidang Istimewa. Selain itu, presiden Abdurrahman Wahid memberikan pandanagannya tekait permasalahan ekonomi yang berjalan baik dalam masa kepimpinannya.

Secara retoris berita berjudul *Pernyataan Presiden* menekankan bahwa pelaksanaan Sidang Istimewa tidak sah dan illegal. Hal tesebut ditunjukkan dengan penyimpangan-penyimpangan yang mendasari pelaksanaan Sidang Istimewa tesebut. Pada berita tersebut terdapat gambar presiden KH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurahman Wahid ketika menyampaikan pernyataannya. Berikut ini gambar yang ditampilkannya:

Gambar 4.5

Hal ini, mendukung maksud dari pemberitaan yang akan disampaikan. Metafora tidak dimuat dalam berita, sedangkan ekspresi menunjukkan ketidaksetujuan presiden Abdurahman Wahid terhadap Sidang Istimewa MPR.

Berdasarkan beberapa pemberitaan yang telah diterbitkan surat kabar Duta Masyarakat pada Mei, Juni, dan Juli 2001 terkait pemberitaan yang berhubungan dengan KH Abdurrahman Wahid sebagaimana yang dimuat diatas, yang kemudian dianalisis dengan analisis wacana menggunakan model Van Dijk dapat terlihat bahwa dalam penyajian berita yang disajikan oleh surat kabar Duta Masyarakat memiliki keberpihakan kepada KH. Abdurrahman Wahid.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas terkait pemberitaan-pemberitaan yang ditampilkan surat kabar Duta Masyarakat dalam memberitakan peristiwa yang berkaitan dengan pemakzulan tehadap presiden KH Abdurrahman Wahid disimpulkan bahwa surat kabar Duta Masyarakat memiliki keberpihakan kepada KH. Abdurrahman Wahid melalui pemberitaan-pemberitaan yang ditebitkannya. Dalam hal tersebut, pemberitaan yang ditampilkan surat kabar Duta Masyarakat berupaya untuk membela KH. Abdurrahman Wahid terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang menimpa presiden KH Abdurrahman Wahid. Hal ini tidak terlepas adanya konteks sosial, karena KH. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam kebangkitan surat kabar Duta Masyarakat. Kemudian, pimpinan umum Duta Masyarakat juga menjabat sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur yang merupakan partai pendukung presiden KH. Abdurrahman Wahid. Disamping itu, surat kabar Duta Masyarakat yang merupakan surat kabar milik Nahdlatul Ulama juga mempengaruhi keberpihakan surat kabar Duta Masyarakat Terhadap KH. Abdurrahman Wahid. Hal tesebut seperti diketahui bahwa KH Abdurahman Wahid merupakan tokoh terpandang Nahdlatul Ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai peran surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi surat kabar Duta Masyarakat pada masa pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid mulai stabil sebagai surat kabar komersil. Meskipun surat kabar Duta Masyarakat telah menjadi surat kabar komersil, tetapi surat kabar ini masih memiliki keterkaitan dengan kepentingan partai. Hal ini terlihat ketika surat kabar Duta Masyarakat tampil membela presiden KH. Abdurrahman Wahid. melalui pemberitaannya, tetapi pengaruh Duta Masyarakat dalam membangun opini publik masih relatif kecil, sehingga Duta Masyarakat tidak dapat berbuat banyak ketika presiden KH. Abdurrahman Wahid dimakzulkan.
2. Peristiwa pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001 berawal dari banyaknya kontroversi yang terjadi pada pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid dan adanya kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*. Sehingga DPR membentuk pansus yang kemudian menghasilkan Memorandum I. Namun, Memorandum itu tidak ditanggapi oleh presiden, Karena memorandum tidak mendapat respon, DPR mengeluarkan memorandum II yang berujung pada Sidang Istimewa MPR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 23 Juli 2001, dimana presiden KH. Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabartannya sebagai presiden dan sekaligus menolak Dekrit Presiden.

3. Upaya Surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui berita yang memihak presiden secara terus menerus.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang peran surat kabar Duta Masyarakat dalam menolak pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Skripsi ini hanya terfokus pada Peran Surat Kabar Duta Masyarakat dalam Menolak Pemakzulan Presiden KH. Abdurrahman Wahid tahun 2001. Untuk peneliti selanjutnya, agar menggunakan surat kabar atau media massa yang lain dan referensi yang lebih banyak untuk menjadi pembanding.
2. Kepada Duta Masyarakat sebaiknya pemberitaan mengenai pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid dapat dibukukan. Hal ini mungkin dapat meluruskan fakta sejarah terkait pemakzulan presiden KH. Abdurrahman Wahid dan bisa menambah referensi bagi peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Aceng. *Press Relations Kiat Berhubungan dengan Media Massa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Barton, Greg. *Biography Gus Dur The Authorized of Abdurrahman Wahid.* Yogyakarta: Lkis, 2011.

Cahyo, Agus N. *Salah Apakah Gus Dur? Misteri di Balik Pelengserannya*. Jogjakarta: Ircisod, 2014.

Ensiklopedi Nasional Indonesa jilid 13. Yogyakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Eriyanto. *Analisis wacana.* Yogyakarta: Lkis, 2003.

Fahman, Mundzar. *Kontroversi Sidang Istimewa MPR 2001*. Surabaya: Lepkiss, 2002.

Gunawan, Bondan. *Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur.* Jakarta: Kompas, 2018.

Harianto, Rahmad. *Dasar Jurnalistik.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, 2002.

Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Sosial dalam Metodologi Sejarah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Kasdi, Aminuddin. *Pengantar dalam Studi Suatu Sejarah.* Surabaya: IKIP, 1995.

Mulkhan, Abdul Munir. *Perjalanan Politik Gus Dur*. Jakarta: Kompas, 2010.

Sjahril, T & M. Sjureich. *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Djakarta: Serikat Penerbit Surat kabar Pusat, 1971.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sjamsudin, Helius. *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Ombak, 2007.

Susanto, Nugroho Noto. *Mengerti Sejarah.* Jakarta:UI Press, 1985.

Wahidin, Samsul. *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Wicaksana, Anom Whani. *Gus Dur Jejak Bijak Sang Guru Bangsa.* Yogyakarta: C-Klil Media, 2018.

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zulaicha,Lilik. *Metodologi Sejarah I.* Surabaya: UIN Suan Ampel, 2005.

Skripsi

Ahmad Rizal Fawa'id, "Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Ahmad. "Peran Media Harian Bima Ekspress (BIMEKS) dalam Mengawal Pilkada Kabupaten Bima 2015*"*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016.

Zaini, Ahmad. "Dinamika Pers Nahdlatul Ulama (NU) (Studi Sejarah dan Perkembangan Harian Umum Duta Masyarakat Tahun 1954-2016 M)". Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Surat Kabar

AF, Eko Yulistyo, et al. "Pers di Kibar Panji-Panji Partai". D & R. 31 Oktober 1998.

Redaksi. "Kejagung Soal Kasus Bulog-Brunei "Presiden Tidak Terlibat". Duta Masyarakat. 9 Mei 2001.

Redaksi. "651 Kiai Jateng Tidak Rela Gus Dur Dijatuhkan". Duta Masyarakat. 22 Mei 2001.

Redaksi. "Ada kecenderungan pers menjadi mesin politik". Duta Masyarakat. 23 Mei 2001.

Redaksi. "Dur Saya Tidak Akan Mundur". Duta Masyarakat. 15 Mei 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Redaksi. “FKB Harus Menggugat”. Duta Masyarakat. 6 Juni 2001.

Redaksi. “Kawan-Kawan Siap Bela Gus Dur”. Duta Masyarakat. 13 Juni 2001.

Redaksi. “Kekuatan Parpol ancaman baru dunia pers”. Duta Masyarakat. Jumat 12 november 1999.

Redaksi. “Koran jangan hanya mengejar uang”. Duta Masyarakat. 8 Mei 2001.

Redaksi. “Media sibuk mengepung gus dur”. Duta Masyarakat. 11 juni 2001.

Redaksi. “Pernyataan Presiden”. Duta Masyarakat. 23 Juli 2001.

Redaksi. “Pers Indonesia didiskusikan mahasiswa JI”. Duta Masyarakat. 11 Mei 2001.

Redaksi. “Posisi Gus Dur Belum di Ujung Tanduk”. Duta Masyarakat. 7 Juli 2001.

Redaksi. “Prodem Jatim Sepakat Tolak SI”. Duta Masyarakat. 18 Juni 2001.

Redaksi. “Tolak SI, Semua Membebek FPDIP”. Duta Masyarakat. 10Juli 2001.

Wawancara

Choirul Anam, *Wawancara*, Surabaya, 16 November 2018.

Mokhammad Kaiyis, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2018

Internet

Hamzah. “Duta melalui Masjarakat”, dalam www.nu.or.id (10 Oktober 2018).

HS**,** Hairus Salim**.** “Duta Masjarakat”, dalam www.nu.or.id (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia V.

Redaksi. “Tentang Kami Korannya Gus Dur”, dalam https://Duta.co/tentang-kami/ (10 september 2018).

Sudibyo, Agus**.** “Hubungan Harmonis Gus Dur dan Sejarah yang Tak Terulang”, dalam https://agussudibyo.wordpress.com (10 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id